

**STUDI TIPOLOGI KEMISKINAN PERKOTAAN
DI KELURAHAN BANTA-BANTAENG, KOTA MAKASSAR**

TESIS

SITI FATIMAH UMAMIT

MPW 4513053



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PASCASARJANA UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2018

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Jum'at, 13 april 2018

Tesis atas nama : SITI FATIMAH UMAMIT

NIM : MPW 4513053

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ir. Tommy S.S Eisenring, M.Si.
(Pembimbing I) (.....)

Sekretaris : Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si.
(Pembimbing II) (.....)

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.Si (.....)
2. Dr. Ir. Syafri, M.Si. (.....)

Makassar, 10 September 2018
Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si

TESIS

STUDI TIPOLOGI KEMISKINAN PERKOTAAN DI KELURAHAN BANTA-BANTAENG, KOTA MAKASSAR

Nama Mahasiswa : SITI FATIMAH UMAMIT
NIM : MPW 4513053
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Prof. Dr. Ir. Tommy S. Eisenring, M.Si
Anggota : Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si

TIM PENGUJI

DosenPenguji 1 : Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin. M.Si
DosenPenguji 2 : Dr. Ir. Syafri, M.Si.
TanggalUjian : 13 April 2018
No. Surat Ujian : 114/B.01/PPs/UNIBOS/IV/2018

Direktur Program Pascasarjana
Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah Dan Kota,

Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya, M.Si

PERNYATAAN ORISINALIS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI FATIMAH UMAMIT

NIM : MPW 4513053

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa TESIS yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 april 2018

Yang menyatakan,

SITI FATIMAH UMAMIT

MPW. 45013 041

ABSTRAK

SITI FATIMAH UMAMIT. *Studi Tipologi Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Banta-Bantaeng Kota Makassar.* (Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Tommy S.S Eisenring, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.)

Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Karena, kemiskinan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, sebab itu perlu untuk mengidentifikasi tipologi kemiskinan, Tipologi kemiskinan dalam kajian ini adalah mendeskripsikan karakteristik masyarakat miskin serta identifikasi jenis kemiskinan yang dialami masyarakat miskin di Kelurahan Banta-Bantaeng.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, melalui responden dengan jumlah 43 kepala keluarga dari keluarga miskin. Data diperoleh dengan menggunakan metode wawancara observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, maka disimpulkan bahwa pola kemiskinan di permukiman Kelurahan Banta-bantaeng adalah (a) Karakteristik masyarakat disana bermukim sudah lebih dari 20 tahun, di dominasi oleh suku bugis-makassar dengan matapencaharian adalah buruh bangunan. (b) Kemiskinan di kelurahan banta-bantaeng lebih dikarena faktor structural atau buatan dan faktor pemerataan lapangan pekerjaan. Mayoritas masyarakat miskin merasa dirinya tergolong miskin karena ketidak mampuan ekonomi dan kepemilikan atas sumber-sumber ekonomi, selain itu adanya kebijakan-kebijakan antikemiskinan yang justru menambah subur kemiskinan itu sendiri, sehingga tipologi kemiskinan di Kelurahan Banta-bantaeng tergolong dalam Tipologi Kemiskinan dikarena struktur politik-ekonomi global

Kata Kunci: *Kemiskinan, Karakteristik, dan tipologi*

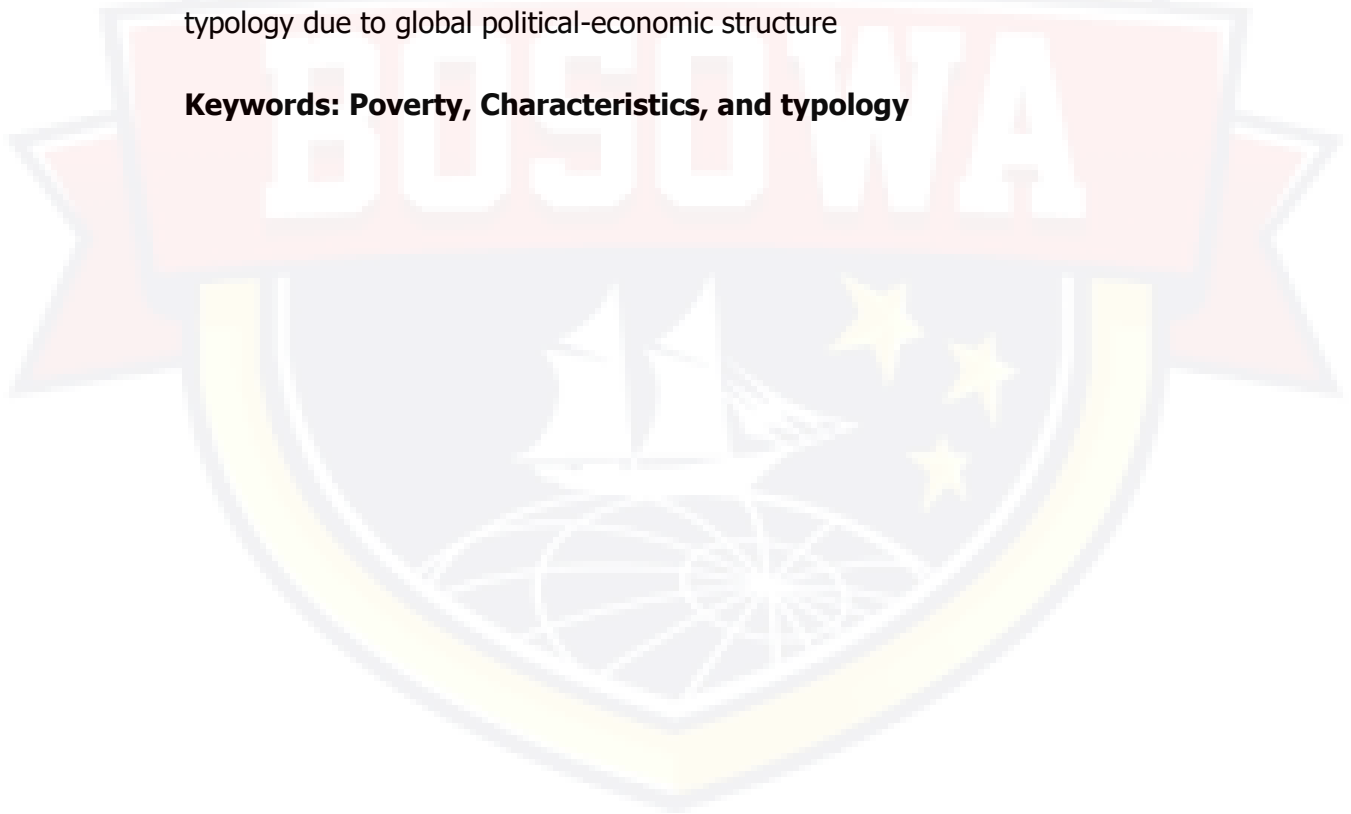
ABSTRACT

Poverty arises due to differences in ability, difference in opportunity, and source differences. Because, poverty can happen anywhere and anytime, because it is necessary to identify poverty typology, Typology of poverty in this research is to describe poor people and poverty of society in Banta-Bantaeng Village.

This research is a qualitative research with descriptive analysis technique, through respondent with 43 head of family from poor family. Data were obtained by using observation method, and documentation.

Based on the findings that occurred in the field, the poverty pattern in Banta-bantaeng urban village is described (a) The characteristics of the people there have been living for more than 20 years, dominated by the bugis-makassar tribe with livelihood is labor-building. (b) Kemisninan in kelurahan banta-bantaeng more due to structural factors or the making and factors of even distribution of employment. The majority of the poor feel themselves poor because of the economic inadequacy and ownership of economic resources, besides the anti-poverty policies that encourage the fertility of poverty itself, the typology of poverty in Banta-bantaeng Urban Village is classified in Kemisninan typology due to global political-economic structure

Keywords: Poverty, Characteristics, and typology



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORISINILAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep dan jenis kemiskinan	8
1. Pengertian kemiskinan	8
2. Penyebab Kemiskinan.....	10
3. Indikator Kemiskinan.....	17
B. Toeritis tentang Kemiskinan Perkotaan	20
1. Teori marjinal.....	20
2. Teori developmental.....	23
3. Teori Struktural Neo-Marxis (ketergantungan) dan pendekatan demokrasi social	25
a. Teori <i>Dependency</i> (ketergantungan).....	25
b. Teori Sistem Dunia.....	27
4. Teori Artikulasi Moda produksi.....	29
5. Tipologi Kemiskinan	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Objek dan informan Penelitian	36

D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	40
F. Teknik Sampling.....	43

BAB VI GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis dan Administrasi.....	45
B. Kondisi Demografi/ Kependudukan.....	46
C. Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Budaya	49
1. Pola Pengelompokan Sosia.....	49
2. Adat Istiadat	49
3. Kondisi perekonomian	49
D. Kondisi Bangunan Lingkungan Dan Sistem Prasarana-Sarana	50
1. Pola Bangunan Permukiman.....	50
2. Jarak, Sempadan dan Kepadatan Bangunan	50
3. Jenis, Jumlah Lantai dan Material Bangunan.....	51
4. Prasarana Persampahan	53
5. Air Limbah	53

BAB V TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Penduduk dan Kondisi Kemiskinan.....	55
1. Kelompok Umur.....	55
2. Lama bermukim.....	57
3. Asal Suku.....	58
4. jumlah Anggota keluarga dan Anak.....	59
5. Konsumsi makanan	61
6. Akses terhadap Air Bersih	62
7. Akses Pelayanan Kesehatan	63
8. Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Anak Bersekolah	64
9. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan	67
10. Status Kepemilikan Rumah.....	71
11. Bantuan Pemerintah.....	73
B. Tipologi Kemiskinan perkotaan.....	76
C. Sintesa Penelitian	78
D.	

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 82

DAFTAR PUSTAKA..... 83

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Tipologi Kemiskinan Perkotaan	32
Tabel 4.1. Luas Kelurahan Banta-Bantaeng Menurut RW, Tahun 2017	46
Tabel 4.2. Kepadatan Penduduk Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016	46
Tabel 4.3. Pengolahan Air Limbah Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2017.....	54
Tabel 5.1. Karakteristik reponden berdasarkan kelompok umur	56
Tabel 5.2. Lama bermukim responden	57
Tabel 5.3. Asal Suku Responden	58
Tabel 5.4. Klasifikasi masyarakat berdasarkan jumlah anggota keluarga	59
Tabel 5.5. Klasifikasi masyarakat berdasarkan jumlah anak yang dimiliki.....	60
Tabel 5.6. Ketersediaan/kekurangan bahan makanan.....	61
Tabel 5.7. Akses pelayanan air bersih.....	62
Tabel 5.8. Pelayanan Kesehatan	64
Tabel 5.10. Jumlah anak yang bersekolah.....	65
Tabel 5.9. Tingkat pendidikan.....	65
Tabel 5.11. Mata pencaharian.....	68
Tabel 5.12. Tingkat pendapatan.....	68
Tabel 5.13. Status pendapatan	68
Tabel 5.14. Status kepemilikan bangunan/rumah	71
Tabel 5.15. Bantuan pemerintah	73
Tabel 5.16. Bantuan pelatihan atau pendampingan usaha	74
Tabel 5.17. Mutu bantuan pemerintah.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016.....	47
Gambar 4.2 Perbandingan Luas Wilayah Per RW Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016	48
Gambar 4.3 Kepadatan Bangunan di Kelurahan Banta-Bantaeng RW 04.....	51
Gambar 4.4 Kondisi Bangunan	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan oleh masyarakat. Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi *issu global*. Terjadi di hampir semua negara berkembang, dimana hanya sebagian penduduknya yang dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas penduduk hidup miskin.

Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya. Selain masyarakat desa, kemiskinan juga melanda masyarakat kota. Kemiskinan pada masyarakat perkotaan lebih mengarah pada mentalitas individualistis, persaingan yang tidak terpadu, yang besar kecenderungannya akan menambah jurang pemisah antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Selain itu, mata rantai kemiskinan juga menimbulkan masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, kehidupan yang tidak layak, kebodohan, dan lainnya.

Hal ini menandakan bahwa kemiskinan adalah masalah krusial dan kompleks yang harus menjadi perhatian semua kalangan. Dengan kata lain, pengurangan kemiskinan bukan hanya menjadi tanggungjawab mereka yang miskin, tetapi juga tanggungjawab mereka yang tidak miskin. Meskipun penanggulangan kemiskinan telah dimulai sejak lama oleh semua Negara termasuk organisasi dunia, namun hingga saat ini tetap saja tidak tertunaskan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 dilakukan pada 300 ribu sampel yang diambil diseluruh provinsi di Indonesia diketahui yakni 11,22% atau sama dengan 28,59 juta penduduk Indonesia. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 860 ribu penduduk miskin bila dibandingkan pada september 2014 dengan porsi 27,73 juta orang atau naik sebanyak 0,26%.

Sementara, jumlah penduduk di daerah perdesaan naik 0,57 juta orang, yakni dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015. Jika dihitung secara persentase, penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 13,76% pada September 2014 menjadi 14,21% pada Maret 2015.

Salah satu fenomena yang terjadi juga di Kota Makassar saat ini adalah seperti yang telah disebutkan diatas dimana permasalahan kebutuhan lahan bagi masyarakat dan kaum urbanis yang berpengasilan menengah kebawah sehingga menyebabkan timbulnya katong-kantong permukiman kumuh di beberapa daerah. Dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa, kota Makassar menyisakan keluarga miskin 62.096 RT (BPS 2011), di antaranya rumah yang tidak layak huni 3.197 RT. Sebanyak 62.550 jiwa penduduk miskin bertempat tinggal dalam kawasan kumuh seluas 398,49 HA pada 10 kecamatan dan sekitar 23 kelurahan (*Idris Patarai, 2011*).

Untuk menghilangkan dampak perkembangan permukiman yang mengalami penurunan kualitas di permukiman Makassar ini, pada saat ini pemerintah sedang menghadapi dilema yang sangat sulit untuk dipecahkan berkenaan dengan deteriorisasi lingkungan permukiman. Disatu sisi deteriorisasi berkembang secara

cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan sehingga menghasilkan berbagai masalah yang sangat kompleks. Di sisi lain secara artifisial pemerintah kota berusaha merencanakan perkembangan kota sesuai dengan perencanaan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi para penduduknya.

Di daerah permukiman yang mengalami perubahan penurunan kualitas atau mengalami deteriorisasi (di dapatkan dari adanya faktor penyebab dan proses yang terjadi), sedangkan cara yang dapat dilakukan melalui rekomendasi proyek perbaikan lingkungan. Meski pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai program penanggulannya misalnya Program Peningkatan Permukiman Kumuh Kampung Improvement Program (KIP) tahun 1969, Peningkatan Kualitas Kampung, Bedah Kampung, NUSSP, P2KP bahkan pembangunan rumah susun sewa nyatanya program itu menemukan kegagalan sebab.

Bila dirunutkan program penanggulangan kemiskinan telah dimulai sejak lama dan terus dilakukan. Sejak repelita I tahun 1969/1970, kebijakan pembangunan ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan hasil pembangunan guna mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan.

Secara politis, sejak tahun 1993 kemiskinan menjadi perhatian presiden. Perhatian ini disusul dengan terbitnya Instruksi presiden (inpres) Nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. Setahun kemudian, yaitu tahun 1994, pemerintah memperkenalkan program Inpres desa Tertinggal (IDT).

Sebagai kelanjutan penyempurnaan dan pendukung program IDT, sejak tahun anggaran 1999/2000 telah diintegrasikan dalam satu kesatuan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi khusus yaitu perluasan jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (JPS-PM) sebagai upaya peningkatan dan penyempurnaan dari program IDT serta program sektoral dan regional yang mendukung pengurangan kemiskinan.

Dalam JPS-PM terdapat berbagai program seperti, program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Takersa/Kukesra, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), Dana Bantuan Opresional Pemeliharaan SD/MI, Bantuan beasiswa Sekolah, dan Dana Bantuan Opresional Pemeliharaan Puskesmas.

Satu dari beberapa permasalahan kebijakan pengurangan kemiskinan di Indonesia selama ini adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Program pengurangan kemiskinan sering dilakukan secara parsial oleh satu atau beberapa lembaga tanpa didasari oleh koordinasi yang baik. Akibatnya sering program yang diluncurkan kurang tepat sasaran, kurang terarah dan terkontrol bahkan dapat menimbulkan program tumpang-tindih atau menciut ketika sampai di bawah.

Hal ini disebabkan *treatment* yang dilakukan tanpa didasari oleh pengetahuan dan pengkajian yang mendalam tentang apa sebenarnya penyebab terjadinya kemiskinan tersebut. Sehingga fenomena kurang tepat sasaran mewarnai segala upaya yang dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Bedasarkan hal itu penelitian ini ingin mengetahui tipologi kemiskinan dilihat dari karakter masyarakat di kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar, sebab masalah kemiskinan dipandang bukan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan karena sebagai akibat dari suatu kebijakan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakter masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Banta, Kota Makassar ?
2. Bagaimana tipologi kemiskinan perkotaan di kelurahan Banta-Bantaeng Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diuraikan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakter masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kota Makassar
2. Untuk melihat tipologi kemiskinan perkotaan di kelurahan Banta-Bantaeng Kota Makassar

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap teori-teori dan konsep-konsep kemiskinan dalam menggambarkan terkait karakteristik dan tipologi masyarakat miskin.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah, lembaga, swadaya masyarakat, maupun *stakeholder* lainnya sebagai acuan dalam perumusan program-program penanggulangan kemiskinan lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tesis secara sistematis terdiri dari 6 Bab. Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan ringkas tentang alur pikir penelitian; khususnya menyangkut urgensi permasalahan yang diteliti, serta manfaat penelitian. Bab ini penting untuk memberikan pengantar untuk memahami permasalahan yang diteliti.

Pada Bab II dengan Tinjauan Teori, akan menjelaskan secara teoritis tentang Konsep dan jenis kemiskinan yang terdiri dari pengertian kemiskinan, penyebab kemiskinan, Indikator kemiskinan, dan Teoritis tentang Kemiskinan Perkotaan. Bagian ini memberikan pemahaman teoritis tentang konsep dan asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam memahami dan menganalisa permasalahan pokok.

Bab III Data dan Metodologi, berisi penjelasan tentang data yang digunakan, pengambilan data dan metode analisis. Bagian ini juga memberikan gambaran tentang proses serta alat analisis yang digunakan.

Bab IV Deskripsi Umum Wilayah Penelitian, memberikan penjelasan ringkas tentang kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kelurahan Banta-Bantaeng. Pentingnya bab ini adalah untuk memahami hubungan empiris kemiskinan dengan kecenderungan-kecenderungan sosial budaya, ekonomi di Kelurahan Banta-Bantaeng.

Hasil penelitian akan disajikan pada Bab V dengan judul Temuan dan Pembahasan. Bab V merupakan bagian yang paling penting dari penelitian. Isi bab ini meliputi data dan interpretasi tentang kondisi dari variable i kemiskinan, Bab ini sekaligus menentukan tipologi yang terjadi di kelurahan Banta-bantaeng dari variable yang telah diurai.

Bagian akhir adalah Bab VI Penutup, berisi kesimpulan berupa poin-poin inti dari pembahasan pada Bab V, dan rekomendasi yakni berupa implikasi kebijakan yang perlu diambil sehubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Kelurahan Banta-banateng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dan Jenis Kemiskinan

Konsep dan jenis kemiskinan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvergen menuju peningkatan yang lebih baik. Kondisi dikatakan miskin puluhan tahun yang lalu akan berbeda dengan kondisi yang dikatakan miskin saat ini. Kemiskinan memang tidak mudah didefinisikan, karena kemiskinan itu mengandung unsur dari ruang dan waktu. Pemahaman terhadap kemiskinan tergantung pada pendekatan atau perspektif yang digunakan, Sehingga membahas tentang konsep kemiskinan dikaji dari pelbagai sudut pandang (Lihat Maipira, 2014 : 2-8)

1. Pengertian Kemiskinan

Studi sosiologis tentang kemiskinan diawali oleh Charles Both dan B. Seebom Rowntree (Townsend, 1954 dalam Maipira 2014: 11), yang menyatakan bahwa suatu keluarga termasuk dalam kemiskinan primer jika keseluruhan pendapatannya tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan minimum. Sedang dikatakan kemiskinan sekunder yakni keluarga yang pendapatannya secara keseluruhannya cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik semata.

Dalam paradigmanya terdapat dua teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan, yaitu teori neo-liberal dan sosial demokrat (Suharto, 2005). Menurut Teori Neo-Liberal oleh Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave berargumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang

sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya. Sedang menurut Teori Sosial Demokrat memandang bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural.

Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) (dalam Mikkelsen, 2003:193) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu, yang mengacu pada konsep miskin relative yang melakukan analisis perbandingan di Negara-negara kaya atau miskin. Konsep absolut dari kemiskinan adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak, dan lain-lain.

Menurut Sumodiningrat (lihat Jamaluddin 2015 : 236), masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan dengan persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional yang dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan nonekonomi (social, budaya, dan politik).

Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkat standar layak hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan, dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan terminology kesejahteraan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi. Seseorang dikatakan miskin bila ia berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati. Niemi (2011) menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli

barangbarang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disederhanakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi keterpaksaan untuk bertahan dibawah standar kehidupan yang layak serta diabaikan dalam interaksi sosial. Keadaan yang terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Hal ini pula yang dialami oleh masyarakat yang bermukim di kelurahan Manuruki.

2. Penyebab Kemiskinan

Menurut teori Neo-Liberal Penyebab kemiskinan adalah persoalan individual, yaitu kelemahan-kelemahan pribadi atau karena pilihan-pilihan individu yang bersangkutan. Sedang teori Sosial Demokrat menyatakan kemiskinan penyebabnya struktural, yaitu ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai sumber-sumber kemasyarakatan.

Nasikun (dalam Suryawati 2005: 123) menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

- a. *Policy induces processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
- b. *Socio-economic dualism*: negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena

tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

- c. *Population growth*: perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedang penambahan pangan seperti deret hitung.
- d. *Recources management and the environment*: adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
- e. *Natural cycles and processes*: kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, di mana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
- f. *The marginalization of woman*: peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
- g. *Cultural and ethnic factors*: bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
- h. *Explotative intermediation*: keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat).

- i. *Internal political fragmentation and civil strife*: suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
- j. *International processes*: bekerjanya system-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Menurut Bank Dunia (2003) penyebab kemiskinan adalah: (1) kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal; (2) terbatasnya kesediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan prasarana; (3) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector; (4) perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan system yang kurang mendukung; (5) perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sector ekonomi (ekonomi tradisional dan ekonomi modern); (6) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat; (7) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (8) tidak adanya tata pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*); (9) pengelolaan sumberdaya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan (Lihat Adon Nasrullah Jamaluddin, 2015 : 242).

Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya (*resources endowment*) di suatu wilayah, yaitu lahan yang subur, tenaga kerja yang terampil dan ketersediaan modal serta kemampuan mengelola sumberdaya tersebut. Dengan demikian perbedaan intensitas pembangunan antar wilayah akan memunculkan permasalahan

kesenjangan pendapatan (*income disparity*) atau permasalahan kemiskinan antar wilayah.

Kemiskinan menurut sifatnya dibedakan dalam kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolute merupakan keadaan yang ditunjukkan oleh kekurangan sumber daya yang dibutuhkan untuk bisa bertahan hidup. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan keadaan yang menunjukkan kekurangan sumber daya pada suatu individu atau kelompok masyarakat dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya, dengan kata lain perbandingan tentang standar hidup mereka serta ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Kebutuhan yang di maksud mencakup kebutuhan ekonomi, social, politik, emosional, maupun spiritual. Kebutuhan ekonomi, emosional, social, dan politik sangat beragam bagi setiap orang. Oleh karena itu, pengertian "miskin" itu biasanya dipersempit hanya miskin secara ekonomi (Yohandarwati, ddk, 2004) . secara ekonomi juga dipersempit lagi sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar, berupa kebutuhan pangan dan nonpangan

Menurut *Sharp et al.* (2000 dalam Wijanarko 2013: 27), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab

yaitu :

- a. Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering

menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.

b. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.

c. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.

Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Dan dari hal ini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan.

d. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

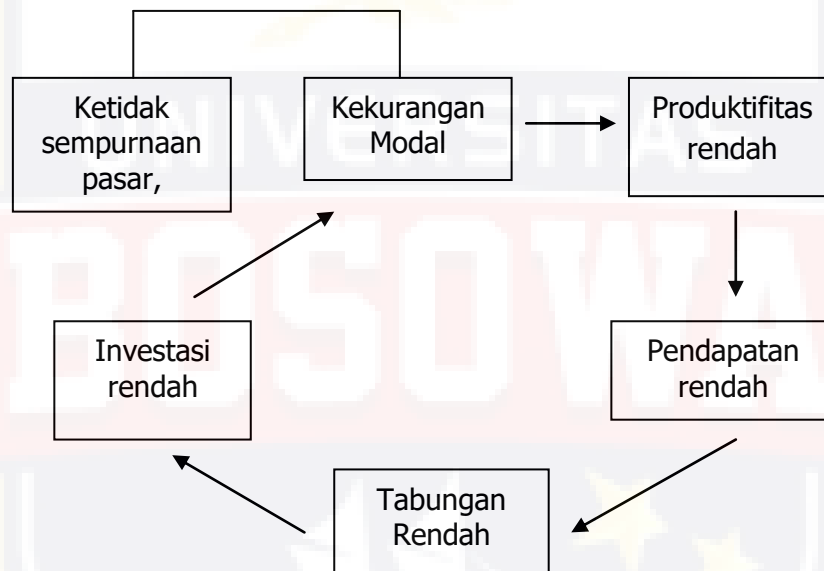
Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang masih jarangmemanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk memasak lebih cenderung menggunakan kayu bakar dari pada menggunakan gas yang lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan.

e. Tingginya pertumbuhan penduduk.

Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah

penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia. Hal ini merupakan salah satu indikator penyebab terjadinya kemiskinan.

Kuncoro (2000) jika dilihat secara makro maka kemiskinan muncul akibat ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya sehingga akan menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Kuncoro (2000) berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan maka akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Proverty)

Sumber : Kuncoro, 2000 (lihat dalam Wijanarko 2013: 29)

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menentukan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama, antara lain pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), dan pendekatan *objective and subjective* (lihat A. Pendekatan kebutuhan dasar melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi.

Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif, seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar, seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan objektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normative dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan

Pendekatan subjektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapatan atau pandangan orang miskin. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak dapat didefinisikan dengan sangat sederhana karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan materiel, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia lain. Oleh karena itu, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain dipengaruhi.

3. Indikator kemiskinan

Kemiskinan dapat ditemukan dimana-mana dengan karakteristik yang berbeda-beda pada masing-masing dimensi ruang dan waktu. Penentuan indikator yang tepat merupakan titik awal keakuratan penghitungan kemiskinan. Indikator kemiskinan pada dasarnya sama dengan indikator kesejahteraan, tetapi dalam konteks kemiskinan yang menjadi fokus adalah pada aspek kekurangan atau ketiadaan indikator-indikator tersebut bagi orang miskin.

Indicator utama kemiskinan menurut Bank dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas; terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sector ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang buruk, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Indicator-indikator tersebut dipertegas dengan rumusan konkret yang dibuat Bappenas, yaitu terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, abak balita, dan ibu. Sekitar 20% dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengonsumsi

1.571 kali perhari. Kekurangan kalori yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masi dalam oleh 60% penduduk berpenghasilan rendah.

Di Indonesia penghitungan resmi tentang kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungan pertama kali dilakukan pada tahun 1984, mencakup periode 1976-1981. Pendekatan yang dilakukan oleh BPS untuk mengukur kemiskinan adalah menggunakan pengeluaran konsumsi sebagai indikatornya. Data tentang konsumsi tersebut diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi yang saat ini sudah dilakukan setiap tahun.

Sebahagian orang memahami, bahwa kemiskinan identik dengan kekurangan dalam bidang materi atau pemenuhan kebutuhan pokok. ada 14 kriteria keluarga miskin menurut Badan Pusat Statistik, yakni: (a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; (b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan; (c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester; (d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain; (e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; (f) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan;(g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang minyak tanah; (h) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu; (i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; (j) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari; (k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik; (l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani,

nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan; (m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD; (n) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. (lihat Makmun 2014 : 6)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indicator utama kemiskinan adalah; (1) kurangnya pangan, sandang,dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) terbatasnya kecukupan dan mutu; (9) terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan; (10) terbatasnya akses dan mutu pendidikan; (11) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (12) lemahnya perlindungan terhadap asset usaha. Perbedaan upah; (13) terbatasnya akses pelayan perumahan dan sanitasi; (14) terbatasnya akses terhadap air bersih; (15) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (16) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam; (17) lemahnya jaminan rasa aman; (18) lemahnya partisipasi; (19) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (20) tata kelola pemerintahan yang buruk menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan public, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan social terhadap masyarakat.

B. Toeritis tentang Kemiskinan Perkotaan.

1. Teori Marjinal

Teori Marjinal berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya 'kebudayaan kemiskinan' (*culture of poverty*) yang tersosialisasi di kalangan masyarakat atau komunitas tertentu, sekaligus penyebab langgengnya kemiskinan.

Konsep kebudayaan kemiskinan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1959 dalam buku *Five Families: Mexican Case studies in the Culture of poverty* dilanjutkan dari buku Michael Harrington, *the Other American* (New, York : MacMillan, 1962 Hlm. 103)

Culture of poverty adalah adaptasi dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dimana kebudayaan tersebut cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut mencerminkan upaya mengatasi keputusasaan dari angan sukses di dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas.

Oscar Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan banyak terjadi. Nilai-nilai ini, menurut Lewis, diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Secara psikologis, kaum miskin tidak sanggup menerima kondisi-kondisi perubahan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. (Lewis 1984: 1)

Oscar Lewis telah menguraikan secara tajam bahwa kemiskinan terjadi karena berkerja tidak berorientasi pada prestasi, indikator ini sangat jelas dalam kultur masyarakat kita yang senantiasa bekerja hanya berpikir pada upaya pemenuhan kebutuhan sesaat tapi tidak terpikir untuk prestasi. Adapun yang dimaksudkan dengan prestasi di sini adalah bagaimana mereka memaksimalkan upaya untuk keluar dari kultur kemiskinan mereka, misalnya dengan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sehingga menurut Lewis bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata karena kekurangan dalam ukuran ekonomi, tetapi juga melibatkan dalam ukuran kebudayaan dan kejiwaan (psikologi) yang diwariskan dari generasi orangtua kepada generasi anak-anak dan seterusnya, kekurangan menurut ekonomi sebagian terbesar bersumber pada system ekonomi yang berlaku dalam masyarakat yang lebih luas di mana masyarakat miskin itu hidup.

Kebudayaan Kemiskinan terlihat dari pola-pola kelakuan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh orang miskin, cara hidup inilah yang merupakan landasan terbentuknya kebudayaan kemiskinan (yang menurut Oscar Lewis, antara lain telah mendorong terwujudnya sikap-sikap menerima nasib, meminta-minta, atau mengharapkan bantuan maupun sedekah) Dengan demikian dapat ditemui bahwa dalam masyarakat-masyarakat premitif dan masyarakat berkasta, kebudayaan kemiskinan tidak berkembang. Dalam masyarakat-masyarakat sosialis, fasis, kapitalis yang telah maju, yang negaranya menganut sistem bantuan untuk kesejahteraan, adanya kebudayaan kemiskinan cenderung menurun.

Bagi Lewis Masalah dan kondisi yang memberikan kemungkinan budaya kemiskinan itu berkembang adalah bersumber dari masyarakat kapitalis industry

dengan ketidaksetaraan yang menyertainya. Beberapa karakteristiknya meliputi, upah buruh dan produksi untuk keuntungan; tingkat pengangguran yang tinggi; setengah pengangguran untuk tenaga kerja yang tidak terampil; upah rendah; kegagalan untuk menyediakan organisasi ekonomi politik social bagi penduduk berpenghasilan rendah (Lihat Eisenring, 2017: 160)

Ada dua pendekatan perencanaan yang bersumber dari pandangan teori marjinal:

- i. Prakarsa harus datang dari luar komunitas;
- ii. Perencanaan harus berfokus pada perubahan nilai, karena akar masalah ada pada nilai.

Implikasi dari Pendekatan I :

- Kebijakan Kota Tertutup
- Program-program pembaharuan kota dengan pembongkaran-pembongkaran permukiman liar dan kumuh.
- Program-program transmigrasi yang bertujuan menyingkirkan kaum miskin
- Program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai berbagai tindakan represif.

Implikasi dari Pendekatan II :

- Program pembangunan masyarakat yang berbasis pada Perubahan Nilai.
- Program penanggulangan kemiskinan melalui berbagai berbagai tindakan represif.

2. Teori Developmental

Teori Developmental (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama neo-liberal, yang merupakan aliran teori yang mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi & masyarakat sebagai suatu kesatuan. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Teori developmental kemudian berasumsi bahwa :

- Negara-negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut-atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan untuk mengatasi masalah-masalah ketimpangan.
- Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila kekuatan-kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Ketiga asumsi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi bukanlah persoalan budaya, sebagaimana anggapan teori marjinal melainkan adalah persoalan ekonomi dan pembangunan.

Sehingga untuk mencapai pembangunan ekonomi, pembangunan perlu di arahkan pada peningkatan kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (*economic of skale*) dan perolehan modal investasi. (lihat brown & Panayotow, 1992; Bryant & White, 1986; Brown 1986 dalam Eisenring 2017 : 169)

Untuk mencapai efisiensi perkotaan di kota-kota kita, kebijakan tata ruang harus memperhatikan penyediaan tanah yang sah bagi kaum miskin di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat proximitas (kedekatan) yang tinggi, yaitu kedekatan komunitas tersebut ke sentra-sentra kegiatan kota dimana kebanyakan dari kaum miskin itu bekerja. (Lihat Eisenring, 2017: 167)

Pentingnya efisiensi berkaitan dengan kemampuan kota menciptakan penghematan-penghematan skala. Dalam lingkup perkotaan, penghematan skala berarti penghematan waktu dan energi untuk melakukan produksi-produksi barang dan jasa perkotaan.

Penerapan program-program structural adjustment, seperti Program Jaringan Pengaman Sosial atau JPS, di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neo-liberal dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

Implikasi Pandangan Neo-Liberalisme pada Kebijakan :

- Rencana-rencana pembangunan yang diarahkan pada kekuatan-kekuatan produksi, efisiensi perkotaan, penghematan skala (*economic of scale*) dan perolehan modal investasi.
- Pembangunan prasarana untuk mengatasi ketimpangan spasial
- Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan
- Perencanaan-proyek-proyek pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sehingga Program-program JPS di negara-negara sedang berkembang adalah contoh kongkrit pengaruh neo-liberal dalam bidang pengentasan kemiskinan.

Kelemahan utama Neo Liberal adalah terlalu berfokus pada *income poverty*. Ini menimbulkan 3 kelemahan pada kebijakan:

- Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentuk kesengsaraan orang miskin
- Tidak mempertimbangkan keterlibatan upaya atau strategi orang miskin itu sendiri dalam mengatasi kemiskinan mereka
- Tidak mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan secara mendasar.

Kritikan yang paling tajam terhadap pandangan "*developmental*" ialah bahwa konsekuensi paling umum dari pertumbuhan ekonomi yang pesat adalah meingkatnya pengangguran dan jurang pemisah yang semakin menyolok antara si "kaya" dan si "miskin".

3. Teori Struktural Neo-Marxis (ketergantungan) dan pendekatan demokrasi social.

a. Teori *Dependency* (ketergantungan)

Teori dependensi membatasi analisisnya pada tingkat nasional, serta memfokuskan pada masa jaya dan bangkrutnya suatu Negara. Sehingga terdapat beberapa pemikiran terkait teori dependensi ini.

Menurut pemikiran Paul Baran diantaranya (i) Hubungan antara negara maju dengan negara terbelakang menyebabkan ketergantungan negara terbelakang terhadap negara maju. (ii) Sistem ekonomi kapitalis & imperialisme menyebabkan keterbelakangan negara berkembang. (iii) Surplus ekonomi dari industri kapitalis asing di neg berkembang di bawa ke

negara maju. (iv) Kapitalis asing sering menggandeng tuan tanah & pedagang (konglomerat) di neg berkembang. (v) Pemerintah biasanya mensupport kapitalis asing (vi) Rakyat kecil dirugikan.

Ketergantungan sendiri didefinisikan oleh Dos Santos sebagai keadaan di mana kehidupan ekonomi negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara lain. Negara tersebut tersebut hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Sedangkan Teori Dependency (Ketergantungan) yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frank (1967) melalui bukunya "*Capitalism and Underdevelopment in Latin America*". Kemudian mengatakan (i) Keterbelakangan merupakan produk struktur ekonomi kapitalis global, (ii) Kapitalis asing bekerjasama dengan elit politik & pengusaha domestik hadir untuk mengorbankan kepentingan rakyat, (iii) Pembangunan ekonomi akan menguntungkan kapitalis asing, elit politik, & kelompok pengusaha, (iv) Tidak ada *trickle down-effects*.

Secara jelas teori *dependency* dapat dilihat dari asumsi/proposisinya sebagai berikut :

- Dunia di dominasi oleh suatu perekonomian tunggal sedemikian rupa sehingga semua negara di dunia diintegrasikan ke dalam lingkungan produksi kapitalis yang menyebabkan keterbelakangan di *Periphery* (negara-negara pinggiran)
- Negara-negara pusat (*core*) menarik surplus di negara-negara *periphery* melalui suatu matarantai metropolis-satelit
- Akibatnya *Periphery* makin miskin dan *Core* makin kaya.

Dengan berdasar pada pemikiran Dependency tersebut, Teori Struktural mengajukan asumsi bahwa kemiskinan di Dunia Ketiga harus dilihat pada suatu konstelasi ekonomi internasional dan struktur politik global yg menerangkan bahwa ketergantungan itulah yg menjadi penyebab negara-negara terkebelakang dan masyarakatnya menjadi makin miskin.

Teori Struktural berasumsi bahwa kemiskinan dikota-kota Dunia Ketiga terjadi bukan karena persoalan budaya, dan juga bukan bukan persoalan pembangunan ekonomi, melainkan persoalan struktural, yang hanya dapat dijelaskan dalam konstelasi politik-ekonomi Dunia.

Ada 3 (tiga) pendekatan Perencanaan yang bersumber dari asumsi-asumsi Teori Struktural dan Dependency:

1. Kemiskinan harus dilihat secara dinamis dari bagaimana usaha dan kemampuan kaum miskin itu sendiri dalam merespon kemiskinan mereka
2. Indikator kemiskinan semestinya merupakan indikator yg komposit dengan unit analisis keluarga (rumah tangga) dan jaringan sosial (*social work*) yang ada disekitarnya.
3. Konsep kemampuan sosial (*social capability*) dipandang lebih lengkap dari pada konsep pendapatan.

b. Teori Sistem Dunia

Toeri Sistem-Dunia (*World System*) dapat dikatan merupakan pengembangan dari Teori *Dependency*. Teori ini berasumsi bahwa terdapat pembagiah kerja transnasional dan antar-regional, yang membagi dunia ke

dalam negara-negara inti (*core*), Negara-negara semi-pinggiran (*semi-periphery*), dan negara-negara pinggiran (*periphery*) (Eisenring 2017:173).

Pembagian kerja ini menyebabkan adanya dua daerah yang saling bergantung, yaitu negara inti dan negara pinggiran. Negara inti berfokus pada keterampilan yang lebih tinggi, produksi padat modal, dan ekstraksi bahan baku. Sementara itu, negara *semi-periphery* bertindak sebagai zona penyangga antara inti dan pinggiran serta memiliki campuran jenis kegiatan yang ada di negara inti dan *periphery*.

Tokoh utama dari Teori Sistem Dunia adalah Immanuel Maurice Wallerstein, seorang sosiolog Amerika. Analisis sistem-dunia dibangun berdasarkan, tetapi berbeda secara mendasar dengan teori *Dependency*.

Perspektif sistem dunia mempelajari dinamika sejarah sistem ekonomi dunia. Wallerstein berpendapat bahwa system-ekonomi kapitalis dunia berkembang melalui kecenderungan sekularnya (*secular trends*) yang meliputi proses pencaplokan (*incorporation*), komersialisasi agrarian, industrialisasi, dan proletarianisasi (Lihat Surya 2011:8).

Menurut Wallerstein, Negara-negara inti tidak mengeksploitasi Negara-negara miskin untuk dua alasan. *Pertama*, Kapitalis inti mengeksploitasi pekerja di semua zona ekonomi kapitalis dunia (bukan hanya pinggiran) dan oleh karena itu, redistribusi penting antara ini dan pinggiran adalah nilai "*surplus*" bukan "kekayaan" atau sumber abstrak yang terkandung. *Kedua*, Negara-negara intin tidak mengeksploitasi Negara-negara miskin, sebagaimana anggapan teori *dependency*, karena Kapitalisme

diselenggarakan sekitar pembagian kerja antar-regional dan transnasional daripada pembagian kerja intrernasional (lihat Eisenring 2017: 174).

Meski demikian, baik *Dependency* maupun Sistem-dunia, kedua-duanya masih memiliki kelemahan serius di dalam menjelaskan secara rinci tentang bagaimana terjadinya ke miskinian di perkotaan.

4. Teori Articulation of Mode of Production (Artikulasi Moda Produksi)

Teori artikulasi muncul berakar dari karya Marx maupun Engels mengenai moda produksi prakapitalis atau moda produksi kapitalis dan dalam karya-karya terdahulu dari teoritis Marxis klasik seperti Lenin dan Kautsky Yang bertitik tolak dari konsep Formasi Sosial (Lihat Surya, 2011 : 16).

Pendekatan artikulasi dengan fokus moda produski, pada mulanya berkaitan erat dengan yang dikembangkan oleh antropolog Perancis, seperti Claude Meillassoux, Terray, Pierre Phillippe Rey dan Taylor (Surya 2011: 17).

Munculnya teori ini dikarenakan ketidakpuasan terhadap teori ketergantungan karena pada dasarnya pembangunan dan industrialisasi memang terjadi di negara-negara terbelakang.

Teori ini berasumsi bahwa reproduksi kapitalisme di negara-negara periphery terjadi dalam suatu simultanitas tunggal di mana pada sisi periphery, terjadi artikulasi dari sedikitnya dua moda produksi (moda produksi kapitalis dan moda produksi pra-kapitalis). Teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari

kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut.

Koeksistensi dari kedua moda produksi tersebut menghasilkan eksploitasi tenaga kerja murah dan problem akses bagi kelompok masyarakat miskin yg masih tetap berada dalam ranah moda produksi pra-kapitalisme atau pra-kapitalis atau non-kapitalis.

Strategi penanganan kemiskinan ditawarkan oleh Teori Artikulasi Moda Produksi dikenal dengan "person-in-environment", dan "person-in-situation" yang dianalogikan sebagai strategi "ikan-kail"

- 1) Memberikan keterampilan memancing
- 2) Menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok elit dalam masyarakat.
- 3) Mengupayakan perluasan akses pemasaran bagi penjualan ikan.

Pada teori ini, persoalan keterbelakangan dilihat dalam lingkungan proses produksi. sehingga teori ini melihat persoalan keterbelakangan dalam lingkungan proses produksi, artinya keterbelakangan di negara-negara Dunia Ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Teori Artikulasi Moda Produksi melandasai 2 (dua) macam pendekatan: Moderat dan Radikal. Pendekatan Moderat, meliputi:

- 1) Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial
- 2) Program jaminan perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial.

- 3) Program-program pemberdayaan masyarakat (Country/ society empowerment)

Pendekatan Radikal meliputi anggapan:

Bahwa justru di dalam masyarakat itu sendiri terjadi ketidak-adilan dan ketimpangan, yang menyebabkan taraf hidup sebagian warga masyarakatnya tetap saja rendah

- 1) Karenanya kebijakan yang paling tepat adalah gerakan untuk mengadakan reformasi dan transformasi terhadap berbagai intitusi yang dianggap kurang menguntungkan kaum miskin

C. Tipologi kemiskinan

Tipologi kemiskinan dalam kajian ini adalah identifikasi dan deskripsi karakteristik masyarakat miskin dan tipologi kemiskinan, dalam pe menggambarkan kondisi dan mengidentifikasi secara jelas dan tepat faktor-faktor yang membentuk kemiskinan.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional dan berangkat dari teori yang telah dijabarkan sebelumnya terkait kemiskinan, maka kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa tipologi, diantaranya :

Tabel. 2.1 Tipologi Kemiskinan Perkotaan

Tipologi	Ciri-Ciri
<p>Kemiskinan dikarenakan Budaya Kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Malas • Pemboros • Tidak mempunyai pengetahuan dan visi • Kurang kreatif • Kurangnya kemampuan membaca dan menulis • Berkarakter apatis
<p>Kemiskinan dikarenakan kurangnya atribut pembangunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya tingkat pendidikan • Terbatasnya kemampuan manajerial • Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; • Tidak ada modal • Keterbatasan pilihan dalam menentukan kepentingan-kepentingan sendiri • rendahnya akses terhadap sumber daya • Kekurangan bahan makanan selama seminggu • besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga

Tipologi	Ciri-Ciri
Kemiskinan karena struktur politik-ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup
global	<ul style="list-style-type: none"> • tingkat pendapatan rendah • ketidakberdayaan atau daya tawar yang rendah • ketimpangan pada pendapatan • Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan • Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha • terbatasnya akses terhadap air bersih • lemahnya status kepemilikan bangunan dan penguasaan tanah • ketidaan bantuan dari pemerintah • kurangnya proteksi pemerintah

Sumber : Olahan Teori 2017

Selain melihat tipologi kemiskinan yang terjadi di kelurahan Banta-bantaeng, dilakukan juga mmatan mengenai karakteristik masyarakat difokuskan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi sosial masyarakat. Zarmawis (2003;32-33) mengatakan bahwa Karakteristik sosial masyarakat dilihat dari lama tinggal, umur,pekerjaan, jumlah tanggungan, dan status kepemilikan rumah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan Kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Dalam penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia. Hal ini berarti bahwa para peneliti kualitatif mempelajari benda-benda lingkungan alamiah, berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka (Denzin & Lincoln, dalam Creswell, 2012: 58)

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi, wawancara (interview), analisis isi, dan metode pengumpul data lainnya untuk menyajikan respons – respons dan perilaku subjek.(Setyosari, 2012: 40).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik masyarakat dan bentuk tipologi yang terjadi di kelurahan Banta-Banteng, maka jenis

pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Format desain deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data dalam bentuk studi kasus.

Menurut Creswell, penelitian studi kasus adalah strategi kualitatif di mana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan mendalam. Kasus-kasus tersebut dibatasi oleh waktu dan aktivitas, sehingga peneliti harus mengumpulkan informasi yang detail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu tertentu (Creswell, 2010, h.343)

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Banta-Bantaeng ,secara administrasi termasuk dalam Kecamatan Rapocinni Kota Makassar. Alasan Pemilihan Lokasi ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan dokumentasi dan observasi diketahui bahwa kelurahan Banta-Bantaeng masuk dalam kawasan prioritas yang dalam program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
- b. Ada banyak penduduk miskin di Kelurahan ini, berdasarkan data dalam dokumen RPLP terdapat 838 orang yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan hanya 80 orang

kepala keluarga dari tiga RW yang disarankan oleh kepala Kelurahan Banta-Bantaeng, yakni RW-04. RW ini adalah wilayah yang memiliki penduduk miskin terbanyak dan termasuk dalam pemukiman kumuh.

Waktu penelitian ini berlangsung mulai dari bulan Desember-Februari tahun 2017-2018 di kelurahan Banta-Bantaeng.

C. Objek dan informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terkategori miskin. Sementara objek penelitian adalah karakteristik masyarakat miskin serta tipologi kemiskinan di kelurahan Banta-Bantaeng.

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperoleh (Bungin, 2007:107). Sedangkan menurut Lofland adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2012:112).

Informan dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Sedangkan ukuran sampel *purposive* sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan

(titik dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian). Namun informan berikutnya akan ditentukan bersamaan dengan perkembangan *review* dan analisis hasil penelitian saat pengumpulan data berlangsung.

Dalam penelitian ini, para informan yang diwawancarai yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami sendiri kemiskinan, BKM, dan Kepala Kelurahan Banta-Bantaeng

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu para kepala keluarga yang termasuk dalam masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dari standar yang telah ditetapkan BPS sehingga terkategori miskin. Dimana keluarga dan masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan, kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, dan sanitasi.
2. Ketua RT/RW di Kelurahan Banta-Bantaeng yaitu pihak yang mengetahui perkembangan arena serta interaksi organisasi atau kelembagaan terkait kemiskinan yang diteliti

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan kajian dokumen-dokumen dan pengumpulan atau pembuatan material audio visual (Cressweel, 2012, 300)

Menurut Bungin (2007: 110) bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah metode wawancara mendalam, observasi partisipan, bahan dokumenter, bahan visual, dan metode penelusuran bahan di internet.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara dilakukan secara bertahap.

Karakter utama dari wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan social informan. Kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan. (Bungin, 2007:113)

Anas Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya

pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna. Wawancara ini diharapkan mampu mendapatkan gambaran secara detail tentang tipologi kemiskinan di Kelurahan Banta-Bantaeng

2. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah observasi kelompok. Observasi kelompok ini dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus.

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan data yang tampak pada objek penelitian (Hadari, 2006:23). Observasi lapangan dilakukan dalam rangka cross-check lapangan atas informasi yang telah diberikan melalui wawancara, seperti bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Miskin di kelurahan Banta-Bantaeng, kondisi sosial terkait interaksi dan ikatan masyarakat di kelurahan Banta-Bantaeng namun untuk kondisi

sosial ini secara lebih juga akan didukung dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data observasi ini sebagai pendukung data-data yang telah dikumpulkan.

3. Metode Dokumentasi

Hadari Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

Dalam penelitian ini, dokumen terkait mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Kelurahan Banta-Bantaeng.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan tahap-tahap menurut Sarantakos (1993). Tahapan tersebut terdiri dari tiga tahap umum, yaitu : *data reduction*, *data organization* dan *interpretation* yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Data reduction* (reduksi data), pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang diteliti. Dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa yang diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya, metode apa yang akan digunakan untuk menganalisis yang akhirnya akan membawa kepada kesimpulan.
2. *Data organization* (organisasi data) yang telah ditentukan sebelumnya meliputi beberapa kategori. Tahap ini adalah tahap proses pengumpulan (*assembling*) informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian.
3. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran), tahap ini meliputi proses pengidentifikasian pola-pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*), dan penjelasan (*explanations*) yang akan membawa kepada kesimpulan yang telah tertuju melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan (Alston & Bowles, 1998, h.195)

Untuk memperkecil bias ataupun kesalahan yang berkaitan dengan pengambilan sampel dan teknik wawancara yang memungkinkan terjadi, analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (pemeriksaan silang dari berbagai perspektif). Dimana menurut Mikkelsen (1999:291), bahwa dimungkinkan untuk mencapai triangulasi dalam strategi penelitian kualitatif dengan mengombinasikan pengambilan sampel untuk tujuan tertentu dan memasukkan multi perspektif. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh keakuratan data terhadap bahasan penelitian yang ditujukan untuk check dan recheck hasil wawancara antara masyarakat dan kepala kelurahan.

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara ke dalam transkrip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan.

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeksplorasi masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian.

F. Teknik Sampling

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data yang dianggap mewakili karakteristik/sifat yang dimiliki oleh populasi tersebut (lihat Sugiyono, 2012 :119). Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas, objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi kepala keluarga yang bermukim di kelurahan Banta-Bantaeng. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel Purposive dan Snowball. Untuk efisiensi penelitian, maka sampel ditetapkan secara proporsional dengan menggunakan rumus matematis. Rumus teknik sampling yang digunakan dalam menentukan banyaknya sampel dan dianggap dapat mewakili responden dengan responden masyarakat di Kelurahan Banta-Bantaeng, kecamatan Rappocinni adalah :

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)} \quad n = \frac{t^2(p \times q)}{d^2}$$

Dengan ketentuan:

n = Sampel

n₀ = Sampel Asumsi

t = Koefisien Kepercayaan (*Coefficient of Confidence*)

d = Sampling Error

p&q = Parameter Proporsi Binomial

N = Populasi (*Size of Population*)

Keterangan:

d = 0,1 ditentukan peneliti

t = 1,96 (95 %) ditentukan peneliti

p&q = (50% : 50%) ditentukan peneliti

Data statistik menunjukkan masyarakat yang bermukim kelurahan

Manuruki di ketahui: Populasi (N) = 80 KK

$$n_0 = (1,96)^2 \cdot (0.5) \cdot (0.5) / (0,1)^2 = 96.04 \sim 96$$

$$n = 96 / (1 + (96/80)) = 43 \text{ KK}$$

Dari perhitungan diatas maka sampling yang akan diambil di kelurahan Banta-Bantaeng dibulatkan menjadi sebanyak 43 Kepala Keluarga, yang tersebar di seleruh kelurahan Banta-Bantaeng.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis Dan Administrasi

Banta-Bantaeng adalah salah satu dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Rapocini dengan kondisi topografi yang relatif datar. Secara geografis Kelurahan Banta-Bantaeng terletak antara titik $5^{\circ} 09' 47,1''$ LS dan $119^{\circ} 25' 41,9''$ BT.

Posisi kelurahan Banta-Bantaeng terletak di sebelah selatan kota Makassar dengan :

- batas Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Buakana dan Kelurahan Rappocini
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tamalate
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tidung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mamajang

Luas total wilayah kelurahan Banta-Bantaeng adalah 138,98 Ha dengan penggunaan lahan pada umumnya berupa permukiman yang tersebar hampir di setiap wilayah kelurahan. Dalam lingkup administrasi terkecil terbagi dalam dua lingkungan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Luas Kelurahan Banta-Bantaeng Menurut RW, Tahun 2017

NO	LOKASI	LUAS (Ha)
1.	RW 1	37,20
2.	RW 2	18,8
3.	RW 3	24,7
4.	RW 4	6,10
5.	RW 5	7,60
6.	RW 6	19,60
7.	RW 7	19,80
8.	RW 8	3,17

Sumber : Kantor Kelurahan Banta-Bantaeng, 2018

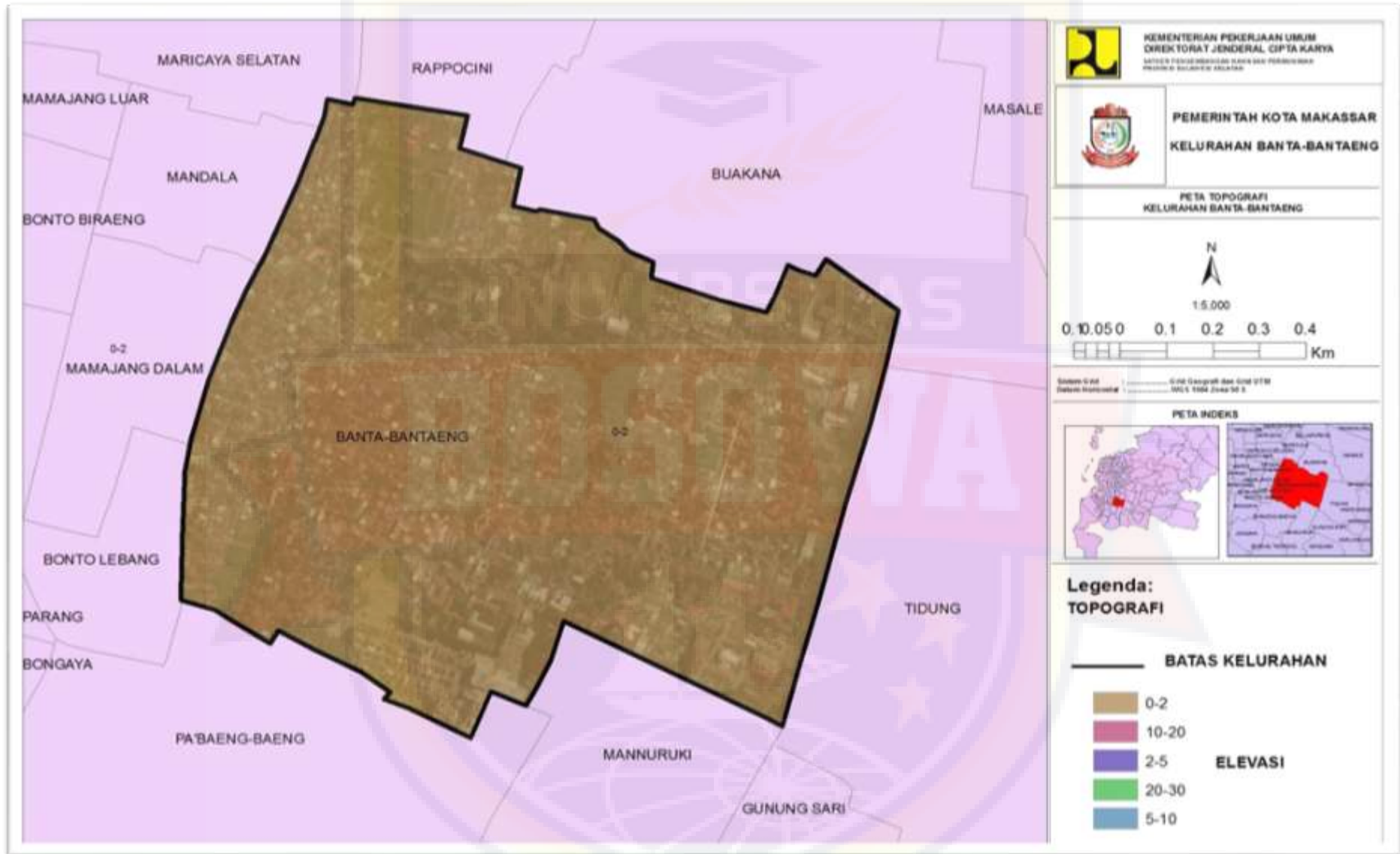
B. Kondisi Demografi/ Kependudukan

Kepadatan penduduk di Kelurahan Banta-Bantaeng menurut data yaitu 152,72 Jiwa/Ha ,yang terbagi 8RW , yang paling padat tingkat kepadatan penduduknya ada di RW 05 Sebesar 304,16 Jiwa/Ha dan yang paling rendah tingkat kepadatannya RW 07 yaitu 41,44 Jiwa/Ha. Untuk lebih jelasnya akan diurai di dalam tabel 2.3 mengenai kepadatan penduduk dengan data baseline yang telah dilakukan di periode 2015.

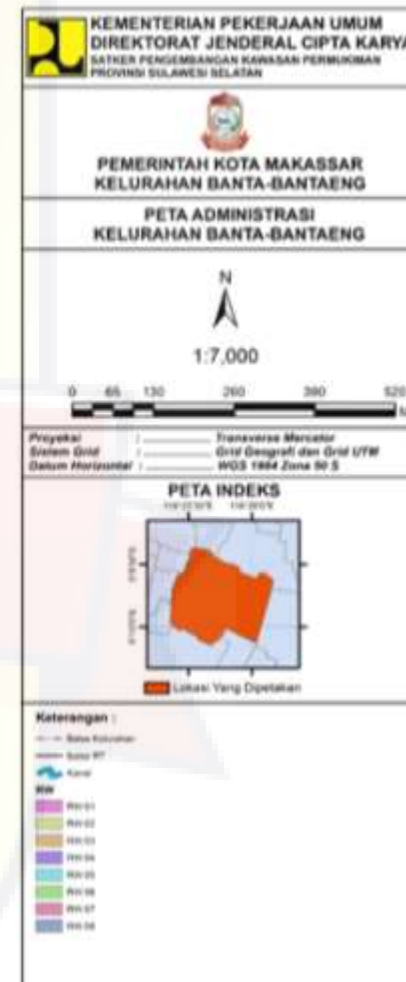
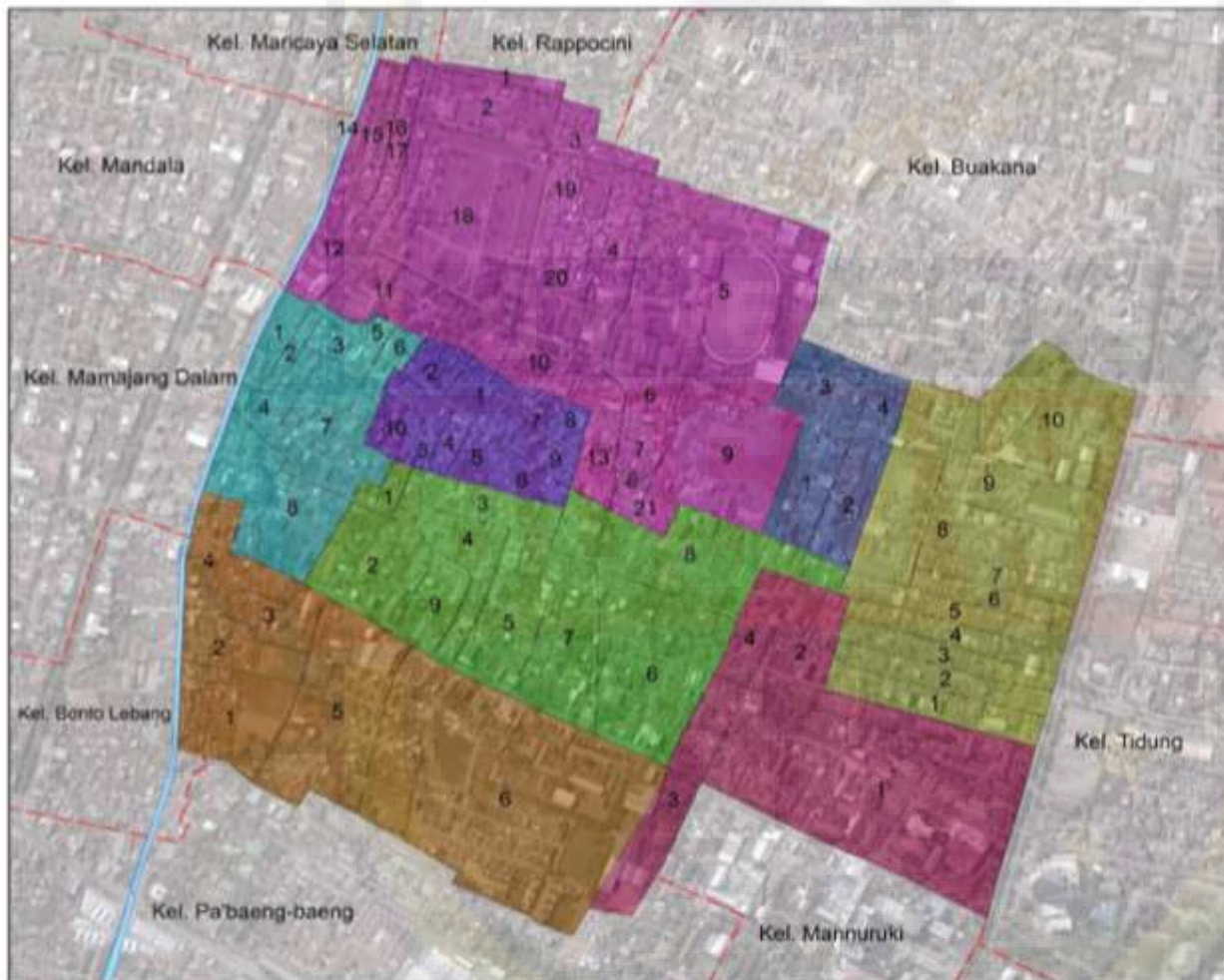
Tabel 4.2 Kepadatan Penduduk Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016

No	RW	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	RW 1	105,67
2	RW 2	71,36
3	RW 3	194,23
4	RW 4	191,56
5	RW 5	304,16
6	RW 6	167,98
7	RW 7	41,44
8	RW 8	217,76
Rata - Rata		152,72

Sumber : Kantor Kelurahan Banta-Bantaeng, 2018



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016



Gambar 4.2 Perbandingan Luas Wilayah Per RW Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2016

C. Kondisi Ekonomi, Sosial Dan Budaya

1. Pola Pengelompokan Sosial

Pola hubungan sosial masyarakat Banta-Bantaeng Kecamatan Rappocini sangat dinamis karena banyaknya suku atau etnis pendatang dari luar kota, terutama suku Makassar dan bugis yang sebagian besar adalah para pedagang. Tuntutan untuk mempertahankan budaya lokal sedikit longgar yang dipengaruhi oleh para pendatang dari luar tadi, hal itu membuat masyarakat lokal terpengaruh akan pola pikir yang dibawa oleh kaum urban tersebut, selain etnis makassar dan bugis juga etnis lain seperti china, jawa membawa pengaruh yang kuat dan jawa juga terlibat dalam proses interaksi budaya dan pola pikir sehingga symbol-simbol local pada masyarakat kelurahan mengalami pergeseran, namun hal itu bukanlah suatu bentuk dari akulturasi budaya melainkan suatu bentuk kerukunan sosial dan solidaritas budaya yang mengarah pada peningkatan etos saling berbagi dalam pembangunan.

2. Adat Istiadat

Unsur pembentuk kebudayaan secara umum di Kota Makassar adalah suku bugis - makassar, jika adapaun yang berbeda yakni pada perbedaan dialeg, dan sistem upacara adat dan ritual keagamaan serta bentuk bangunan. Selain itu masyarakat yang berdiam pada umumnya memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap sesama mereka. Hal ini nampak juga di dalam pembentukan kemiskinan di Kelurahan Banta-Bantaeng, karena budaya yang toleran sehingga terjadi pembiaran-pembiaran yang semestinya tidak dilakukan seperti kurangnya kepedulian terhadap lingkungan.

3. Kondisi Perekonomian

Tingkat pendapatan masyarakat di Kelurahan Banta-Bantaeng bervariasi tetapi dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu Masyarakat dengan taraf hidup menengah ke atas (Non MBR) dan juga masyarakat dengan taraf hidup menengah ke bawah atau dengan kata lain dapat disebut MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah). Masyarakat

yang tergolong MBR memiliki penghasilan kurang atau sama dengan Rp. 1.500.000,-/bulan sebagian masyarakat yang menempati kawasan kumuh di RW 04 itulah yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan juga mempengaruhi kondisi ekonomi. Secara umum mata pencaharian utama masyarakat di Kelurahan Banta-Bantaeng(hasil pendataan Baseline) adalah bergerak di bidang jasa/perdagangan dan pegawai negeri sipil.

D. Kondisi Bangunan Lingkungan Dan Sistem Prasarana-Sarana

1. Pola Bangunan Permukiman

Bentuk dan pola permukiman di Kelurahan Banta-Bantaeng pada umumnya terdiri dari dua yakni secara linear mengikuti pola jalan eksisting dan berbentuk cluster /kawasan, beberapa rumah tampak menyebar dan ada yang berkumpul dalam sebuah titik sehingga mengakibatkan kepadatan yang cukup sesak jika dilihat secara visual.

2. Jarak, Sempadan dan Kepadatan Bangunan

Jarak antar bangunan didefinisikan sebagai jarak antar bangunan (rumah) satu dengan bangunan lainnya diperlukan sebagai tindak mitigasi bencana jika sewaktu-waktu terjadi, dan sekaligus memberikan ruang untuk resapan air tanah, sirkulasi udara, pencahayaan serta estetika dalam segi arsitektur dan mencegah terjadinya kepadatan bangunan yang berlebih.

Tingkat kepadatan bangunan di Kelurahan Banta-Bantaeng umumnya berada di kisaran sekitar 28 unit/Ha yang dikatakan tergolong sedang jika memakai skala kota kabupaten di Bagian Timur Indonesia. Sedangkan jarak rata-rata antar rumah terutama di kawasan permukiman kumuh \pm 1-1,5 meter.



Gambar 4.3
Kepadatan Bangunan di Kelurahan Banta-Bantaeng RW 04

3. Jenis, Jumlah Lantai dan Material Bangunan

Berdasarkan hasil dari data di dapat dari kelurahan kondisi bangunan yang ada di Kelurahan Banta-Bantaeng dapat dikatakan bervariasi , baik itu dari jenis material yang digunakan, Jumlah lantai hingga pada jenisnya. Tetapi umumnya rumah-rumah yang ada berbentuk rumah batu (permanen) dengan satu lantai , dan sebagian lagi berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu yang berciri khas makasar dengan menggunakan material dari kayu. Dan ada juga rumah yang ditujukan sebagai rumah persewaan (kost).



Gambar 4.4 Kondisi Bangunan

4. Prasarana Persampahan

Pengembangan prasarana persampahan diarahkan untuk peningkatan dan perluasan pelayanan pembuangan sampah, sehingga permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan sejak dini melalui sistem prasarana (jaringan) persampahan secara terpadu. Selain itu permasalahan mengenai persampahan harus dikombinasikan serta diformulasikan dengan budaya mengenai cinta kebersihan lingkungan untuk penyadaran pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Di kelurahan Banta-Bantaeng sendiri pola-pola pembuangan sampah dilakukan dengan cara diangkut oleh motor sampah/ mobil sampah, pengangkutan sampah dilakukan hampir setiap hari, sehingga untuk sampah rumah tangga sudah ditangani dengan baik, namun demikian masih ada sampah yang berserakan di sekitar permukiman, terutama di dalam drainase, ini semua karena kurangnya kesadaran masyarakat terutama anak-anak, sehingga membuat saluran drainase sering tersumbat.

5. Air Limbah (Sanitasi)

Jaringan limbah rumah tangga di Kelurahan Banta-Bantaeng secara umum dapat dikatakan belum memenuhi standar kesehatan, hal ini terlihat dari genangan yang sebagian besar terjadi karena buangan limbah yang tidak mengalir dan merembes ke permukaan tanah. Sedangkan untuk pemenuhan jamban keluarga umumnya sudah menggunakan kloset leher angsa yang terhubung dengan septic tank dan memenuhi persyaratan teknis minimum sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.3 Pengolahan Air Limbah Kelurahan Banta-Bantaeng Tahun 2017

Kelurahan	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga)	Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga)
Banta-Bantaeng	2809	2791

Sumber : Kantor Kelurahan 2016



BAB V

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan temuan lapangan hasil penelitian analisis tipologi kemiskinan perkotaan yang merupakan studi kasus terhadap masyarakat di kelurahan Banta-Banteng kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Bab ini terbagi dalam dua sub bab, sub bab pertama yaitu gambaran kondisi kemiskinan di RW 04 yang dijabarkan dengan menggunakan indikator kemiskinan dari tiap-tiap tipologi yang sudah ditentukan. Sub bab kedua yaitu menentukan tipologi kemiskinan perkotaan yang terjadi selama ini di Kelurahan Banta-Bantaeng.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini ada sebanyak 43 orang dengan jumlah informan 8 informan. Temuan lapangan ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka (*open ended*) dengan menggunakan pedoman wawancara semi struktur.

A. Karakteristik Penduduk dan Kondisi Kemiskinan

untuk mengetahui karakteristik penduduk dan sejarah bermukim penduduk Kelurahan Banta-Bantaeng, pertanyaan meliputi umur, lama bermukim, dan asal etnis. Uraian seluruh item pertanyaan untuk mengetahui karakteristik penduduk dan sejarah bermukim penduduk secara rinci akan dijelaskan dalam bentuk tabel dan gambar yang dijabarkan secara deskriptif.

1. Kelompok Umur

Tingkat usia merupakan salah satu indikator penentu produktifitas kerja seseorang. Hal ini dapat terlihat seseorang yang berusia produktif antara usia 1-55 tahun mampu berproduktifitas dengan baik dan menghasilkan sesuatu

yang berguna dikarenakan usia mereka masih muda dan memiliki fisik yang masih kuat jika dibandingkan dengan seseorang yang sudah memasuki usia tidak produktif ≥ 55 tahun. Dengan tidak produktifitas kemampuan manusia maka akan jelas mempengaruhi jumlah curahan jam kerja dan jumlah upah yang diperoleh

Untuk mengetahui karakteristik penduduk menurut kelompok umur maka peneliti menggunakan data primer lapangan yang didapat langsung dengan menyebarkan kuisioner dan dari hasil kuisioner, responden di kelurahan Banta-Bantaeng memiliki umur yang bervariasi yaitu antara 20-55 tahun. Adapun distribusi frekuensi klasifikasi umur berdasarkan tingkat produktifitasnya disajikan pada tabel 5.1

TABEL 5.1
KARAKTERISTIK RESPONDEN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR

No	Kelompok Umur	JUMLAH	%
1	Belum Produktif (< 15 tahun)	0	0
2	Usia Produktif (15 – 55 tahun)	29	67.4
3	Usia Tidak Produktif (> 55 tahun)	14	32.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa Diketahui presentase terbanyak dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur adalah penduduk dengan usia produktif (15-55 tahun) sebanyak 67.4% atau 29 responden dari 43 sampel. Dengan membandingkan jumlah tersebut, bahwa

jumlah penduduk usia produktif di Kelurahan Banta-Bantaeng dominan dari pada jumlah usia tidak produktif.

2. Lama Bermukim

Lama bermukim dalam mengidentifikasi karakteristik sosial masyarakat miskin menjadi penting dilakukan mengingat ini erat kaitannya dengan status kepemilikan bangunan, sehingga uraian dan penjelasan tentang pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah bermukim responden akan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 5.2.

LAMA BERMUKIM RESPONDEN

No	LAMA BERMUKIM	JUMLAH	%
1	< 29 tahun	15	34.9
2	30-59 tahun	22	51.2
3	> 60 tahun	6	14.0
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Tabel 5.2 menggambarkan pengelompokan responden berdasarkan lama bermukim diketahui pengelompokan responden berdasarkan lama bermukim didominasi oleh masyarakat yang telah bermukim selama 30-59 tahun sebanyak 51.2%.

"lama mi saya tinggal disini dari sejakku lahir. sekarang umurku 50an tahun mi, dan memang asli ". (Bpk. Abu Bakar DG. Bombong, 23 Feb 2018)

Selanjutnya persentase terbesar kedua dari data lama bermukim responden yaitu responden yang telah bermukim <29 tahun lalu sebanyak 34.9%, mereka rata-rata adalah umur produktif yang telah tinggal sejak lama di Kelurahan Banta-Bantaeng

Saya bukan ji asli Makassar tapi sudah tinggal ka disini mulai dari tahun 1989, kira-kira 29 tahunan mi (Bpk.Zaidin, 23 Feb 2018)

Walaupun seluruh anggota keluarga yang termasuk angkatan kerja, bisa bekerja tetapi produktivitas mereka akan dibatasi oleh jumlah anggota keluarga dan anak yang dimiliki. Akibatnya pendapatan perkapita juga menurun, sehingga resiko menjadi miskin semakin besar

3. Asal Suku

latar belakang suku responden umumnya adalah Bugis dan Makassar namun ada juga yang percampuran kedua suku ini, selain dari ini ada juga yang dari berasal dari Luwu, selayar bahkan bima, sehingga distribusi frekuensi berdasarkan asal etnis atau suku responden dapat di lihat pada Tabel 5.3

TABEL 5.3
ASAL SUKU RESPONDEN

No	ASAL ETNIS	JUMLAH	%
1	Bugis	7	16.3
2	Makassar	34	79.1
3	Lainya	2	4.7
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Tabel 5.3 menjelaskan bahwasanya masyarakat yang tinggal dan menetap di Kelurahan Banta-Bantaeng di dominasi oleh responden yang berasal dari etnis atau suku Makassar dengan persentase sebanyak 79.1 % dan merupakan suku asli kelurahan Banta-Bantaeng, sedangkan selebihnya sebanyak 16.3 % be, responden yang jumlahnya kurang dari 4.7 suku yang di maksud disini berasal dari daerah Bima, mereka adalah pendatang bukan penduduk asli daerah kelurahan Banta-Bantaeng.

Saya dari Bima tapi pindahka di Makassar untuk mencari pekerjaan lantas menikah dan sekarang tinggal ma disini (Bpk.Zaidin, 23 Feb 2018)

Saya aslinya Bugis-Makassar, usiaku 50 tahun tapi tinggalka di Makassar sejak 25 tahun mi lebih paceku ji yang asli disini (Bpk. Anwar, 23 feb 2018)

4. jumlah Anggota keluarga dan Anak

Jumlah anggota keluarga memiliki konsekwensi dalam besaran kebutuhan keluarga yang harus disediakan. Sehingga jumlah anggota keluarga yang mendiami satu rumah dan anak yang banyak memungkinkan untuk menjadi masalah besar dalam perekonomian keluarga, di keluarahan banta-bantaeng sendiri, jumlah anggota keluarga dan anak dapat dilihat pada tabel 5.4 dan tabel 5.5 berikut :

TABEL 5.4. KLASIFKASI MASYARAKAT BERDASARKAN JUMLAH ANGGOTA KELUARGA

No	JUMLAH TANGGUNGAN KELURAGA	JUMLAH	%
1	< 3 orang	6	14.0
2	3 – 5 orang	14	32.5
3	> 5 orang	23	53.5
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

TABEL 5.5.
KLASIFIKASI MASYARAKAT
BERDASARKAN JUMLAH ANAK YANG DIMILIKI

No	JUMLAH ANAK	JUMLAH	%
1	< 3 orang	12	27.9
2	3 – 5 orang	23	53.5
3	> 5 orang	8	18.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Dari Tabel 5.4 diatas, sebagian besar (53.5%) masyarakat termasuk didalam kelompok tanggungan keluarga besar yaitu >5 orang. sedangkan selebihnya sebanyak 32.5 % merupakan kelompok tanggungan keluarga yang terdiri dari 3-5 orang. jumlah anak yang dimiliki diketahui sebesar 53.5% responden memiliki 3-5 orang anak.

Selain jumlah anak yang besar, hal lain yang menjadi sebab banyaknya jumlah anggota keluarga adalah faktor pernikahan dini yang dilakukan oleh anak-anak mereka, sehingga setelah menikah anak-anak dan menantu mereka masih tetap mendiami rumah yang sama tersebut ketidaberdayaan untuk pindah. Dengan demikian semakin cepat keputusan untuk menikah dan berrumah tangga maka semakin panjang waktu bagi keluarga untuk berada pada rumah tangga usia muda dengan tingkatan ekonomi yang belum mapan (Lihat Suaib 2008:98). Terkait hal ini berikut hasil wawancara dengan informan :

Ada sekitar 11 orang yang tinggal dirumah, anakku 6 orang asli saya asli Makassar tapi baru ka 30 tahun tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, jadi karena sy tidak bekerja anak-anakku mami yang biayai ka, (DG Sena 23 feb 2018)

*Yang tinggal dirumah itu 7 orang, anakku 3 orang ji saja,
(Mappisangka Dg Sitaba, 24 Feb 2018)*

5. Konsumsi makanan

Kemiskinan ditandai dengan tingkat konsumsi yang rendah dan proporsi pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran yang tinggi (Hukum Engel). Indikator tersebut berlaku bagi penduduk miskin di Kelurahan Banta-Bantaeng, dalam Tabel 5.6 berikut terkait ketersediaan makanan apakah pernah terjadi kekurangan bahan makanan selama seminggu dalam kurun waktu 12 bulan terakhir :

TABEL 5.6.
KETERSEDIAAN/KEKURANGAN BAHAN MAKANAN

No	KEKURANGAN BAHAN MAKANAN	JUMLAH	%
1	Pernah	19	44.2
2	Tidak Pernah	24	55.8
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Ketidaksediaan bahan makan menunjukkan standar hidup yang aktual sehingga berdasarkan hasil data yang diperoleh dari responden menunjukkan selisih yang beda tipis antara responden yang mengaku pernah kekurangan bahan makan dan tidak pernah kekurangan bahan makanan, yakni terdapat 55.8% responden yang menjawab tidak pernah, sisanya yang menjawab pernah berjumlah 44.2%. meski lebih banyak yang mengatakan tidak pernah kekurangan bahan makanan bukan berarti mereka memiliki kesediaan makanan yang cukup melainkan mereka tetap bisa makan dengan menu

seadanya. Terkait dengan hal ini, berikut hasil wawancara dengan masyarakat:

Tidak pernah sampai seminggu tapi ada pernah sehari kehabisan makanan, jadi biasa makan seadanya saja. biar Cuma nasi ji, sejauh ini Alhamdulillah sedikit-sedikit masih ada untuk dipakai makan dan dipakai hidup. (Bpk. Abu Bakar DG. Bombong, 23 Feb 2018)

Setiap hari ka memulung Cuma tetap dalam sehari masih bisa ka makan, karena disini sendiri ja tinggal, istriku di takalar, uang hasil mulung dalam sehari kubuka sedikit untuk beli makan (Bpk. Tayang 23 feb 2018)

6. Akses terhadap Air Bersih.

Penyediaan dan akses terhadap air bersih merupakan salah satu pendekatan kebutuhan dasar, untuk melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum. Sehingga pada kondisi yang terjadi dikelurahan Banta-Bantaeng terhadap 43 responden untuk mendapatkan akses terhadap air dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut

TABEL 5.7.
AKSES PELAYANAN AIR BERSIH

No	AKSES PELAYANAN AIR BERSIH	JUMLAH	%
1	Tidak Pernah	2	4.7
2	Kadang-Kadang	12	27.9
3	Selalu dapat	29	67.4
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Variabel ini menurut pengamatan tidak menunjukkan hubungan kausal yang logis menurut teori dengan kemiskinan. 67,4% rumah tangga miskin atau sebanyak 29 responden menjawab selalu bisa mendapatkan pelayanan air bersih. Setidaknya terdapat dua faktor mudahnya responden mendapatkan air bersih *pertama* air bersih yang mereka peroleh bersumber dari sumur, *kedua* rumah sewa yang mereka tempati menyediakan air lediang/PAM. sementara 27.9% rumah tangga tidak miskin tidak selalu bisa memiliki akses terhadap air bersih. Terlihat dari hasil wawancara berikut :

Selalu nda pernah tidak dapatair, karena dirumahku ada sumur yang biasanya dipakai sehari-hari seperti mencuci pakean, sayur, dan mandi. Nah kalau untuk air minum itu baru pi dibeli biasanya ta 6000ribu per gergen/gallon (DG Sena 23 feb 2018)

Kadang-kadang ji dapat air bersih kadang jalan kadang juga mati (Bpk. Usman 23 Feb 2018)

7. Akses Pelayanan Kesehatan.

Pada prinsipnya akses terhadap pelayanan kesehatan dianggap semakin baik apabila penduduk semakin memiliki alternatif yang lebih banyak dalam menentukan layanan kesehatan yang dimanfaatkan. Variabel Akses terhadap Pelayanan Kesehatan Pelayanan didefinisikan sebagai kemudahan menjangkau fasilitas kesehatan. Maka untuk melihat sejauh mana pelayanan kesehatan terkases oleh masyarakat disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 5.8.
PELAYANAN KESEHATAN

No	PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH	%
1	Tidak Pernah	3	7.0
2	Kadang-Kadang	27	62.8
3	Selalu dapat	10	23.3
4	Tidak pernah sakit dalam 12 bulan terakhir	3	7.0
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Dari aspek kesehatan data menunjukkan bahwa sebagian penduduk miskin merupakan masyarakat yang rentan terhadap keluhan kesehatan namun 62.8% mengaku tidak selalu bisa mengakses kesehatan sehingga menurut hasil wawancara ketika sakit masyarakat di kelurahan Banta-Banteang sebagian besar lebih memilih membeli obat generik diwarung saja. Dan adapun 23.3% mengaku selalu mendapatkan pelayanan kesehatan, mereka memperolehnya dipuskesmas atau di dokter praktek yang berlokasi di sepanjang Jl.Rappocini.

8. Tingkat Pendidikan Dan Jumlah Anak Bersekolah

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan menggambarkan mengenai tingkat kualitas penduduk dan wilayah itu sendiri. Semakin banyak penduduk yang menuntut pendidikan maka penduduk di wilayah tersebut memiliki kualitas, jika terjadi sebaliknya maka penduduk di wilayah tersebut tidak memiliki kualitas yang baik. Sehingga Untuk melihat tingkat pendidikan dari anggota rumahtangga dewasa ditunjukkan pada tabel 5.9 sedang untuk

jumlah anak-anak usia 7 s/d 16 tahun yang bersekolah dapat dilihat pada tabel 5.10 sebagai berikut :

**TABEL 5.9.
TINGKAT PENDIDIKAN**

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	SD	20	46.5
2	SMP/SMK	13	30.2
3	>SMA	10	23.3
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

**TABEL 5.10.
JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH**

No	JUMLAH ANAK BERSEKOLAH	JUMLAH	%
1	Semua tidak bersekolah	1	2.3
2	Ada yang brsekolah, tapi tidak semua	13	30.2
3	Semua anak-anak bersekolah	21	48.8
4	Tidak ada anak-anak yang berusia 7 s/d 17 tahun	8	18.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Dari tabel 5.9 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Banta-Bantaeng masih sangat rendah. Ini buktikan dari banyak responden yang mengaku hanya sebatas lulus Sekolah Rakyat (SR) atau SD serta kejar paket A adalah 20 orang atau sekitar 46.5% dan 13 responden mengaku hanya mampu bersekolah sampai sebatas SMK, dan alasan memilih sekolah SMK adalah dengan pertimbangan agar setelah lulus bisa lebih mudah mendapatkan pekerjaan, namun pada kenyataan semua responden menceritakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam melamar atau

mendapatkan pekerjaan dikarena ijazah yang mereka miliki tidak memenuhi syarat diperlbagai tempat. Seperti yang dikemukakan informan sebagai berikut:

Tidak ada ijazah yang saya miliki sebab saya nda pernah sekolah, itu tongmi yang bikian susah dapat kerja, banyak mi perkejaan yang sudah saya coba tapi ini mi memulung ji sebagai penghasilanku sekarang (Bpk. Tayang, 23 Feb 2018)

Pernah melamar di took juga nda diterimah karena butuh juga Ijazah, tambah pengalam yang kurang dilihat juga usia jadi suusah dapat kerja (Usman, 23 feb 2018)

Disamping itu jejak pendidikan inipun dialami oleh anak-anak mereka seperti yang ditunjukkan oleh tabel 5.10. terdapat 48.8% jumlah anak mereka yang bersekolah, rata-rata masih dijenjang pendidikan sekolah dasar yang tidak ada pungutan biaya pendidikan atau mendapat bantuan pendidikan dari pemerintah, sedang 30.2% responden menjawab sebagian anaknya ada nyang masih bersekolah dan tapi tidak semua. Kebanyakan setelah lulus sekolah dasar ada yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Seperti yang disebutkan oleh beberapa informan dari hasil wawancara berikut :

3 orang anakku dulu sekolah, tapi sekarang putus sekolah mi. sekolah sampai SMK ji, waktu itu sempat juga kebakaran rumah karena itu juga tidak ada biaya untuk membiayai sekolah anak, sekrang anak-anakku kerja mi jadi buruh bangunan harian. (Bpk. Abu Bakar DG. Bombong, 23 Feb 2018)

Anak saya 2 orang, satu jadi mahasiswa tapi tsatunya lagi tidak kerja, yang mahasiswa ini saja mau lulus tapi belum ada tanda-tanda pekerjaan yang didapat sekarang ini meski ada ijazah sarjana saja masih susah dapat kerja (Bpk. Anwar 23 feb 2018)

Sehingga menurut Suryahadi dan Sumarto (lihat Wijanarko, 2013:33) berpendapat, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi.

9. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendapatan

Menurut Kornita dan Yusbar (2011) karakteristik masyarakat miskin ditinjau dari aspek ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan mata pencaharian.

Berdasarkan Tabel 5.1, dapat diketahui karakteristik responden mayoritas adalah rumah tangga dengan kepala keluarga yang masih berada pada rentang usia produktif. Sedangkan dari tingkat pendidikannya, mayoritas kepala keluarga hanya menyelesaikan pendidikan dasarnya. Keterbatasan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pola pikir serta kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga secara umum mata pencaharian, tingkatan pendapatan responden dapat dilihat pada Tabel 5.11 tabel 5.12 dan tabel 5.13 sebagai berikut :

**TABEL 5.11.
MATA PENCAHARIAN**

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	%
1	Dagang	8	18.6
2	Sopir/ becak,bentor	7	16.3
3	Pemulung	1	2.3
4	Buruh	16	37.2
5	Pelayan (Tukang bengkel dll)	3	7.0
6	PNS/Pensiunan	3	7.0
7	IRT	3	7.0
8	Security	2	4.7
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

**TABEL 5.12.
TINGKAT PENDAPATAN**

No	TINGKAT PENDAPATAN	JUMLAH	%
1	< Rp.150.000-	22	51.2
2	Rp. 150.000-350.000	6	14.0
3	>Rp. 350.000	15	34.9
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

**TABEL 5.13.
STATUS PENDAPATAN**

No	STATUS PENDAPATAN	JUMLAH	%
1	Tidak tetap	32	74.4
2	Tetap	11	25.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, terlihat bahwa penghasilan responden di kelurahan Banta-Bantaeng sangat kecil. Penghasilan seorang buruh bangunan di kelurahan ini berkisar antara Rp.50.000,- hingga Rp.75.000,-/hari dengan masa kerja hanya 4 hari dalam selama 2 minggu setiap sebulan, dari tabel 5.11 diketahui jumlah responden yang berprofesi sebagai buruh bangunan lepas/harian berjumlah 16 responden, 8 responden lain berdagang klontongan, meski berdagang tetap saja masih terasa sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti komentar berikut:

Berjual sekarang sulit, sedikit-sedikit ji untungnya yang penting ada, tidak banyak untung yang didapat tiap harinya karena harga barang semakin mahal, baru nda bisa ki juga kita kasih naik harga barang tambah tidak adami yang beli. Memilih berdagang karena sulit sekali untuk mendapatkan pekerjaan Ijazah terakhir kami itu SMA. (Bpk. Muhammad Tahrir, 24 feb 2018)

Saya berjual-jualan makanan kecil-kecil ini untuk sekedar bantu-bantu suamiku sebagai buruh lepas, pernah ka coba juga melamar pekerjaan tapi itu mi lagi Ijazahku sama pengalam kerja dan usia yang jdipertimbangkan sehingga susah mendapat pekerjaan (Bpk. Usman 23 Feb 2018)

Untuk tabel 5.12 tentang tingkat pendapatan terdapat 51.2% responden memiliki tingkat pendapatan <Rp.150.000,-. sedangkan 16 responden lain memiliki pendapatan >Rp. 350.000,-/berbulan. Sehingga dari penghasilan yang mereka peroleh sebanyak 74.4% responden mengakui bahwa pekerjaan sebagai seorang buruh merupakan pekerjaan yang penghasilan yang tidak tetap, dimana mereka terkadang tidak bekerja sama sekali bila tidak ada

panggilan kerja sebagai buruh, berikut komentar dari beberapa buruh bangunan:

Dalam sehari hasil memulung biasanya hanya dapat Rp.10.000- hingga Rp.20.000,- ji, untuk uang makanku sehari-hari itu 8 ribu memang mi, biasa ka memulung dari jam 5 pagi sampai sore, sudah semua pekerjaan saya coba, mulai dari tukang batu sampai tukang becak, jadi pemulung di Makassar karena dikampung (Takalar) susah dapat pekerjaan biar itu untuk mengelola sawahnya orang karena tergantung musim panen baru tuan-tuan tanah sudah ada memang mi perkerja sawahnya sendiri. Jadi pindahka di makasar. Disini tinggal dengan menyewa rumah Rp.450.000,-/Bulan. Hanya setahun sekali ji pulang ke kampung. Sering kirim uang tapi tidak menentu tergantung ada biasa dikirim Rp.50.000.- atau Si'Bi. Kalau lagi ada itu pas ada yang bongkar rumah, barang-barang bekas itu yang diambil nah kalau dua kali muat gerobak biasanya distu kadang dapat Rp.100.000- Rp.250.000,-(Bpk. Tayang 23 feb 2018)

Kalau jadi buruh ki begini tidak menentu, tunggu pi ada panggilan biasanya ada kalau Makassar kadang tong juga diluar daerah. Seminggu biasa Cuma 3-4 hari kerja dalam sebulan Cuma 2 minggu. Jadi selebihnya menunggu panggilan tidak ada juga yang bisa dibuat kadang antu-bantu tambak nya orang. Rp.50.000,- hingga Rp.75.000,-/hari itu sudah termasuk mi uang makan siang dan rokok,di hitung perhari pekerjaanya tapi dikasihnya per minggu. (Bpk. Abu Bakar DG. Bombong, 23 Feb 2018)

Pernah coba melamar di percetakan tapi kesulitan biaya transportasi yang jauh dari rumah jadi berhenti, tidak ada mi perkerjaanku sekarang (DG Sena 23 feb 2018)

10. Status Kepemilikan Rumah

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas, indikator kemiskinan yang dimaksud adalah keerbatasan akses terhadap tanah, dalam hal ini status kepemilikan bangunan. Hal ini diperkuat oleh data tentang kepemilikan rumah oleh responden.

Dari hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar rumah responden di RW 04 adalah rumah semi permanen, rumah-rumah ini umumnya menjadi milik pribadi masyarakat miskin yang berkerja sebagai buruh. Sebagian juga ada rumah-rumah yang berbentuk rumah batu (permanen) dengan satu lantai , dan sebagian lagi berbentuk rumah panggung yang terbuat dari kayu yang berciri khas makasar dengan menggunakan material dari kayu. Dan ada juga rumah yang ditujukan sebagai rumah persewaan (kost) dan kesemuanya ini sudah teraliri listrik. Untuk status kepemilikan bangunan/rumah responden bervariasi mulai dari menyewa hingga diperoleh dari warisan milik orang tua sedang untuk milik sendiri masih sedikit sekali yang menjawab demikian, lebih jelasnya disajikan dalam tabel 5.14 berikut:

TABEL 5.14.
STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN/RUMAH

No	STATUS KEPEMILIKAN BANGUNAN/RUMAH	JUMLAH	%
1	Milik	5	11.6
2	Menyewa	8	18.6
3	Warisan orangtua	30	69.8
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Hak kepemilikan rumah rata-rata terdapat sebanyak 69.8% atau sebanyak 30 responden yang status kepemilikannya adalah warisan orang tua (budaya), telah tersambung listrik sendiri, kondisi rumah telah batu bata berlantai semen, sumur timba sendiri, ada televisi.ada pula yang tidak memiliki rumah sebanyak 18.6% yang menyewa rumah untuk ditinggali. Sedang untuk kepemilikan pribadi hanya 5 responden yang menjawab demikian. Berikut hasil wawancara mewakili tiap-tiap responden.

Saya memilih bekerja di Makassar sebagai pemulung karena dikampung susah dapat perkajaan, untuk tinggal di Makassar saya harus menyewa rumah Rp.450.000,-/Bulan, dengan fasilitas seadanya tidak besar ji juga Cuma sudah ada air. (Bpk. Tayang 23 feb 2018)

Saya dan keluarga dari jenepoto, tinggal disini menyewa rumah Rp.1.000.000,-/Tahun, hari-hari jadi tukang becak sehari bisa dapat Rp.20.000-30.000-/hari Cuma sabtu dan minggu ji yang tidak keluar karena biasanya nda banyak orang. Kalau untuk air bersih dibeli 1 liter per hari harganya Rp.10.000,-. Makan kami seadanya kadang kalaun dapat lebih bisa beli ikan kadang juga Cuma nai dan sayur. Sisanya

ditabung buat bayar sewa.dalam setahun biasa pulang kalau ada pi acara besar di atas kampung atau seumpama sakit mertua, kalau untuk kiriman uang kekampung biasa kalau dapat ki rezeki harus dikirim mertua karena dia sudah tua dan sakit juga. Kalau ada di kasih kalau tidak ada tidak tolong, apa mau dikasihkan. Tidak menentu karena jarang mi anua dapat uang. Biasa kalau dikirim ta Rp.200.000., atau seratus untuk uang obat dia tidak bisa jalan (Bpk. S Daeng Ngalle, 25 Feb 2018)

Kalau saya dari dulu tinggal disini tinggal sama orang tua jadi sekarang rumah ini menjadi milik saya, rumah ini dulu milik orangtuaku Alm. Dg Caya. (DG Sena 23 feb 2018)

Ini bangunan milik saya sendiri, pertamanya dulu beli tanah baru dibangun prlahan-lahan (Bpk. Anwar, 23 feb 2018)

11. Bantuan Pemerintah

Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Prograram Raskin dan Subsidi BBM, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat atau pemberian uang tunai kepada rumahtangga sangat miskin dengan persyaratan tertentu (*conditional cash transfer*).

Banyak penduduk mengaku sering tidak tahu informasi bantuan apa yang sedang diberikan di kelurahan Banta-Bantaeng. Sebagian mengaku sering diajak untuk ikut dalam rapat rencana pemberian bantuan dari pemerintah,

namun dalam pelaksanaan sering hanya sedikit dari mereka yang menerima dan dilibatkan. Terkait dengan bantuan pemerintah ini dapat di lihat pada tabel 5.15, sedang tabel 5.16 tentang pelatihan, penyuluhan, kursus atau pendampingan usaha yang pernah diikuti responden selama kurun waktu 12 bulan terakhir, serta tabel 5.17 terkait mutu program pemerintah yang dirasakan oleh responden, disajikan sebagai berikut :

**TABEL 5.15.
BANTUAN PEMERINTAH**

No	BANTUAN PEMERINTAH	JUMLAH	%
1	Ya, Mendapatkan	19	44.2
2	Pernah (Kadang-kadang)	16	37.2
3	Tidak pernah	8	18.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Dari tabel diatas sebesar 44.2% menjawab sedang mendapatkan bantuan, yakni Raskin, PKH dan bantuan perbaikan rumah. Dan KIP. Sedang 37.2% responden menjawab pernah mendapatkan bantuan berupa raskin, namun dalam setahun ini sudah tidak mendapatkan bantuan apa-apa lagi dari pemerintah.

**TABEL 5.16.
BANTUAN PELATIHAN ATAU PENDAMPINGAN USAHA**

No	STATUS PENDAPATAN	JUMLAH	%
1	Tidak Pernah	32	74.4
2	Pernah	11	25.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

TABEL 5.17.
MUTU BANTUAN PEMERINTAH

No	BANTUAN PEMERINTAH	JUMLAH	%
1	Rendah	19	44.2
2	Sedang-sedang	16	37.2
3	baik	8	18.6
TOTAL		43	100

Sumber: Olah Data Primer, 2018

Dari kedua tabel diatas sebanyak 74.4% responden mengaku tidak pernah mendapat pelatihan, penyuluhan, kursus atau pendampingan usaha. Untuk mutu bantuan dari program pemerintah 44.2% menjawab rendah beberapa responden tidak pernah didata sewaktu akan ada pemberian bantuan, salah satu masyarakat pernah Raskin, dengan menebus beras sebesar Rp.20.000,- untuk 20 liter. Berikut ini kutipan wawancara dengan informan :

Dapat bantuan sekarang untuk anak sekolah jadi terbantuan nama bantuannya itu Program keluarga Harapan (PKH), bantuan ini dapat 3 bulan sekali berupa uang sejumlah Rp.400.000-500.000,- disekolah juga uang sekolahnya tidak bayar karena bantuan pemerintah kota Makassar, Cuma itu sekolahnya sedikit jauh jadi. Biasa sy yang antar kesana (Bpk. S Daeng Ngalle, 25 Feb 2018)

Dulu pernah dapat bantuan beras Raskin dan selalu dapat Cuma semenjak tahun 2016 sudah tidak lagi, tidak tau mi juga kenapa. Beras raskin itu pertama-tama ji yang bagus, tapi kesnini-kesnini tidak bagus berasnya juga bau. Ya membayar Rp.25.000,-/15 Kg beras.sementara ini dapat bantuan perbaikan rumah, berupa bahan-bahan bangunan. Jadi

harapan kami supaya selalu dapat bantuan untuk pekerjaan, karena sekarang ini barang-barang tamba mahal, jadi buruh juga tidak menentu jadi butuh bantuan pekerjaan. (Bpk. Abu Bakar DG. Bombong, 23 Feb 2018)

Tidak pernah dapat, tidak pernah juga di data. Padahal saya butuh sekali bantuan, makanya berharap sama pemerintah agar bisa ki juga dikasih bantuan untuk kehidupan sehari-hari (Bpk. Tayang 23 feb 2018)

Pernah dulu dapat Raskin tapi sudah tidak mi sekarang itu ada Sastra namanya, ada kartu yang dikasihkan terus digesek di Bank baru dapat ki beras,gula,minyak, dan telur. Kadng tidak menentu tergantung ada, kadang setiap bulan tapi biasa tong tidak ada. (Bpk. Anwar, 23 feb 2018)

Dapat bantuan raskin PKH dan KIP, pernah ada juga krusus mesin ketika tp itu sudah lama sekarang dapat bantuan bahan bangunan sejenis papan, Balok dan seng DG Sena 23 feb 2018)

B. Tipologi Kemiskinan Perkotaan.

Menurut Sapuan dan Silitonga (1994 dalam Susilowati, 2007 :21)), sumber-sumber kemiskinan untuk daerah perkotaan yaitu: (1) buruh kecil di pabrik-pabrik, (2) pegawai negeri atau swasta golongan rendah, (3) pegawai harian lepas, (4) pembantu rumah tangga, (5) pedagang asongan, (6) pemulung, dan (7) pengangguran.

Penduduk di Kelurahan Banta-Bantaeng sendiri cukup beragam, terdiri dari penduduk asli pendatang dan perantau baru. Tipologi kemiskinan di Kelurahan Banta-bantaeng akan dibahas berdasarkan indicator dari variabel yang sudah disebutkan sebelumnya. Sehingga dari uraian mengenai variabel kondisi

responden di atas yang dilakukan tipologi kemiskinan yang terjadi pada Kelurahan Banta-Bantaeng adalah tipologi kemiskinan dikarenakan kurangnya atribut pembangunan serta karena struktur politik-ekonomi global serta kemiskinan karena budaya kemiskinan dengan ciri sebagai berikut:

1. Kemiskinan dikarenakan kurangnya atribut pembangunan

Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal. Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi dan upah yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Keadaan kemiskinan di Kelurahan ini sesuai dan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sharp et al. (2000 dalam Wijanarko 2013: 27) dan teori Developmental. Penyebab kemiskinan yang terjadi didalam elemen masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Banta-Bantaeng terjadi dikarenakan masyarakat kurang memiliki kualitas sumber daya manusia, kurangnya kesempatan pendidikan, dan minimnya penguasaan terhadap teknologi. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah, 46.% kepala keluarga tingkat pendidikan pada jenjang SD, 30.2% sebats SMP/SMK , 74.4% tidak pernah mengikuti pelatihan ketrampilan. Kepemilikan modal usaha, 100% responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki modal usaha untuk mengembangkan usahanya keskala yang lebih besar. 44.2% responden Kekurangan bahan makanan selama seminggu dan 55.8% responden menjawab tidak pernah kekurangan namun makan dengan seadanya saja. 53.5% memiliki besar tanggungan yakni >5 orang dalam satu rumah.

2. Kemiskinan dikarenakan struktur politik-ekonomi global

Tipologi kemiskinan ini didasarkan dari teori structural neo-marxis dan teori artikulasi moda produksi. ketidakterjangkauan PDAM mengakibatkan

pada beberapa responden, masyarakat harus membayar ongkos Rp.10.000,-/liter untuk memperoleh air bersih. 51.2% masyarakat memiliki tingkat pendapatan <Rp.80.000,-/hari. 62.8% responden mengakui kadang-kadang bisa mendapat akses terhadap pelayanan kesehatan. 74.4% masyarakat yang bekerja sebagai buruh mengakui bahwa pendapatan mereka tidak tetap. 67.4% status kepemilikan rumah adalah dari warisan orangtua, 100% tidak memiliki tanah atau sawah yang bisa diolah. 44.2% masyarakat mengatakan masih rendahnya mutu program pemerintah.

3. Kemiskinan dikarenakan budaya kemiskinan

Kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti; tidak mau berusaha (malas), pola hidup boros, tidak kreatif. 85% masyarakat memilih menganggur di rumah saat tidak ada pekerjaan. 81% merupakan perokok aktif.

Dari uraian diatas, bentuk kemiskinan yang paling mendominasi di Kelurahan Banta-Bantaeng yaitu kemiskinan dikarenakan struktur politik ekonomi global (Kemiskinan Struktural). Sebab Menurut Soenardjan (1984 Dalam Nainggolan 2012: 75) kemiskinan structural juga meliputi kekurangan pendidikan. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan dan keterampilan mayoritas masyarakat yang rendah selain itu belum maksimalnya proteksi pemerintah dalam rangka melakukan pemberdayaan untuk memperbaiki kemiskinan. Hal ini mengakibatkan terbatasnya peluang kerja yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang rendah. Tingkat pendapatan yang rendah mengakibatkan masyarakat tidak mampu membiayai sekolah anak-anak, sehingga anak-anak tidak mampu memperoleh pendidikan yang lebih baik yang nantinya

mempengaruhi lingkup kerja mereka yang terbatas. Hal ini mengakibatkan terjadinya perputaran kemiskinan kelurahan ini secara terus menerus.

C. Sintesa Penelitian

Kemiskinan yang terjadi akibat kurangnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pengentasan kemiskinan, bahkan menambah substansinya kemiskinan. Sehingga Menurut Nasikun (dalam Suryawati 2005: 123) yang menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yakni karena adanya *Policy induces processes*: proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan antikemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.

Di Kelurahan Banta-Bataeng sendiri diketahui ada berbagai bantuan dan program penanggulangan kemiskinan hanya saja, program ini tidak berjalan maksimal dalam menanggulangi kemiskinan, bantuan seperti BLT dan Raskin misalnya sudah dua tahun ini sudah tidak lagi didapatkan masyarakat. Selain itu masyarakat bahkan harus membayar sebesar Rp.15.000,- untuk bisa mendapatkan beras Raskin. Sehingga dari realitas ini sejalan dengan Hasil penelitian Marcus J. Pattinama dengan judul: "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Pulau Buru-Maluku dan Surade-Jawa Barat). Penelitian ini fokus pada masalah mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal dan menggali dan memahami kearifan lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif penanggulangan kemiskinan.

Dalam penelitian di atas dijelaskan, bahwa diantara strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dan program ini terjadi bias dan tidak berkelanjutan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah program pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan potensi lokal. (Makmun 2014: 7)

Selain itu sebagai pekerja bangunan, bekerja tergantung pada permintaan. Kalau ada permintaan, pendapatan mereka cukup besar atau berkisar Rp. 50.000,- dan atau Rp.75.000,- perhari. Realita ini Merujuk pada pendapat Soegijoko, tipologi kemiskinan para pekerja bangunan Kelurahan Banta-Bantaeng, juga dapat digolongkan pada *Kemiskinan struktural*, yakni merupakan ketimpangan pendapatan antara kelompok dalam masyarakat tersebut. Dalam pengertian, seseorang/ masyarakat telah memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, tetapi masih rendah pendapatan maupun kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya. Seperti yang disebut oleh Kuncoro (lihat Wijanarko, 2013:88) jika dilihat secara makro maka kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga akan menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab V tentang diskripsi data dan pembahasannya dengan, maka hasil penelitian ini dapat peneliti simpulkan:

- (1) Karakteristik masyarakat miskin yang bermukim di Kelurahan Banta-Bantaeng sudah lebih dari 20 tahun, di dominasi oleh suku bugis-makassar dengan matapencaharian adalah buruh bangunan yang sulit sekali mendapatkan pekerjaan selain dari hal ini lebih dikarena faktor pemerataan lapangan pekerjaan .
- (2) Mayoritas masyarakat miskin merasa dirinya tergolong miskin karena ketidak mampuan ekonomi dan kepemilikan atas sumber-sumber ekonomi, selain itu adanya kebijakan-kebijakan antikemiskinan yang justru menambah subur kemiskinan itu sendiri, sehingga tipologi kemiskinan di Kelurahan Banta-bantaeng tergolong dalam Tipologi Kemiskinan dikarena struktur politik-ekonomi global.

B. Saran

Terkait realitas masyarakat miskin di kelurahan banta-bantaeng maka dibutuhkan perhatian yang lebih serius dan pemilihan kebijakan yang tepat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kesimpulan di atas maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program pembangunan perlu dititikberatkan pada pengembangan infrastruktur dan perluasan lapangan pekerjaan di perkotaan dengan

mendorong tumbuhnya pusat-pusat kegiatan perekonomian sehingga masyarakat di Kelurahan banta-bantaeng bisa memiliki pekerjaan yang tetap.

2. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan belum berjalan efektif, sehingga strategi penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang perlu difokuskan pada pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang murah, mudah diakses, meningkatkan partisipasi, memajukan budaya dan mendorong prestasi bagi penduduk miskin, dan perbaikan struktur usia keluarga. Sehingga Pembangunan pada dasarnya tidak hanya sekedar mengejar angka-angka agregatif yang tinggi, tetapi harus dapat mendistribusikan hasilnya secara adil untuk dinikmati oleh seluruh strata sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alston, Margareth & W.Bowles. (1998). *Research For social worker: An introduction to methods*. Australia : Allen & unvim.
- Badan Pusat Statistik, *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2006*. Jakarta: CV. Nario Sari.
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cet ke 5. Jakarta : Fajar Interpratama
- Creswell, John.W. (2012). *Penelitian Kualitatif dan desain riset " memilih dinantara lima pendekatan"*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Eisenring, T.S.S. (2017). *Konsep dan Toeri, Sosiologi Perkotaan* . Makassar: Fahmis Pustaka.
- Hartono dan Arnicon Aziz. (2014). *Ilmu Sosial Dasar*. Cet Ke 6. Jakarta: Bumi Aksra,.
- Jamaluddin, Adon Nasrullah. (2015). *Sosiologi Perkotaan, Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung : CV Pustaka Setia,
- Kuncoro, Mudjarat. (2000). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : UPP-AMP.YKPN
- Lamberte, Exaltacion E. 2004. "Urban Poverty and Social Safety Net Program in the Philippines," *EADN Regional Project on Urban Poverty and Social Safety Net in East Asia: Final Reports*. <https://slideblast.com/urban-poverty-and-social-safety-net-program-in-the-philippines> (Diakses 2 Oktober 2017 dari EADN)
- Makmun ,fariza. (2014). *Pemetaan Kemiskinan Di Kelurahan Sukarame Bandar Lampung (Studi Tentang Tipologi Kemiskinan)*, jurnal ilmu dakwah dan pengembangan komunitas. nomor :1. Vol:9 .
- Maipira, Indra. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,.
- Nasikun. (2001). *Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nainggolan, Mery Christina. (2012). *Analisis kemiskinan Struktural Masyarakat Petani (Studi Kasus di Dusun Ciaruteun Ilir Desa Caruteun Ilir kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)*. Tesis. Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial.
- Oscar Lewis, *La Vida*, Terj. Parsudi,Suparlan., 1984 .*Kemiskinan di perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Prijana. (2005). *Metode Sampling Terapan*, Bandung: Humaniora.

Suaib, Arifin. (2008). *Faktor determinan Kemiskinan di Povinsi Gorontalo*. Tesis. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik

Surya, Batara. (2011). *Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota*. Makassar: Fahmis Pustaka

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung :Alfabeta.

Wijanarko, Vendi. (2013). *Factor-Faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember*. Skripsi. Jurusan Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan.



DAFTAR NAMA RESPONDEN

No	NAMA RESPONDEN	No	NAMA RESPONDEN
1	Muhammad Amin	24	Baharudin
2	Siti Samsang	25	Dg. Sena
3	Siti Fatimah	26	Anwar
4	Khairul	27	Safarudin Dg. Tgika
5	Syahril	28	Abd. Hafis Dg. Ma'Jja
6	Zainudin Dg Beta	29	Muh. Alfian
7	Syarifudin	30	Kasmawati
8	Asriadi	31	Dg. Gassing
9	Sulaiman	32	Suhendra
10	M. Dg Takle	33	Jumaria
11	Makmur	34	Usman
12	Dg Gading	35	Zaidin
13	Baharudin Dg Nggiwi	36	Tayang
14	Sidaeng	37	Herman
15	M. Ali Dg Bombong	38	Muh. Tahir
16	Daud Rapi	39	Abu Bakar Dg. Bombong
17	Dg. Lau	40	Herli Dg. Nassa
18	Dg. Tara	41	S. Dg. Buntu
19	Dg. Ngalle	42	Dg. Tayu
20	Safarudin	43	Dg. Nikni
21	Muslim		
22	Kasin Dg. Tali		
23	Hanja Dg. Rimang		

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah Ibu/bapak pernah memijam modal dari bank/koperasi ? jika tidak bagaimana cara ibu/bapak untuk mendapatkan uang bila sedang membutuhkan modal ?
2. Bagaimaa status kepemilikan rumah ? bagaimana anda mendapatkan bangunan rumah ini?
3. Apakah Ibu/bapak memiliki kesulitan dalam melamar atau mendapatkan pekerjaan ? bila ada kesulitan, biasanya tersebut apa?
4. Apakah Ibu/bapak mengetahui bantuan apa saja yang pernah dan sedang diberikan pemerintah pada masyarakat disini ? jika ada sejauh mana saja manfaat dari program bantuan pemerintah yang bapak rasakan ?
5. Apakah harapan bapak terhadap pemerintah dalam mebantu masyarakat ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK LURAH

1. Secara umum apa mata pencarian penduduk di kelurahan Banta-bantaeng /
2. Secara umum apakah apakah rumah di RW ini sudah permanen atau semi permanen
3. Bantuan apa saja yang pernah dan sedang diberikan pemerintah pada masyarakat di kelurahan Banta-Bantaeng ? jika aa, sejauh ini apa manfaat dari program bantuan pemerintah yang dirasakan oleh penduduk di kelurhan ini ?
4. Apa saja yang menjadi kendala dalam mendistribusikan bantuan pemerintah selama ini ?
5. Apa yang menjadi harapan bapak terhadap pemerintah dalam membantu masyarakat di kelurahan Banta-bantaeng?

KUISIONER PENELITIAN
STUDI TIPOLOGI KEMISKINAN PERKOTAAN DI KELURAHAN MANURUKI,
KOTA MAKASSAR

Nama :

Nama Kepala Keluarga

RT/RW :

Mata Pencarian

Pendapatan :

Digaji hari/Minggu/Bulan:

PETUNJUK PENGISIAN.

- a. Memohon dengan hormat bantuan dan kesediaan saudara untuk menjawab
- b. seluruh pertanyaan yang ada.
- c. Mohon menjawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani dan
- d. kondisi yang ada.
- e. Kerahasiaan identitas akan dijamin sepenuhnya oleh peneliti dan pengisian
- f. kuisisioner ini murni hanya untuk kepentingan skripsi semata.
- g. Mohon ikuti petunjuk pengisian pada setiap jenis pertanyaan.

DAFTAR PERTANYAAN :

Data Dasar Rumahtangga <i>Lingkari pilihan jawaban di bawah ini!</i>		<i>isi kotak ini dengan angka</i>
Berapa lama tinggal di kelurahan Banta-Bantaeng		
Berapa jumlah keluarga yang ada di rumahtangga ini?		
Berapa jumlah anak yang miliki ?		
Asal suku mayoritas keluarga ? 1. Bugis 2. Makassar 3. Jawa 4. Luwu		
Gizi & Kesehatan		
Dalam 12 bulan terakhir, apakah pernah terjadi kekurangan bahan makanan selama lebih dari seminggu?		
1	Ya, Pernah	
2	Tidak Pernah	
Apakah rumahtangga anda bisa mendapatkan air yang bersih untuk air minum (tidak harus dari PDAM)?		
1	Tidak	
2	Ya, tapi tidak selalu (kadang-kadang)	
3	Ya, Selalu bisa mendapatkan	
Apakah rumahtangga anda selalu mendapatkan pelayanan kesehatan baik medis (dokter, mantri) maupun tradisional (dukun, belian) ketika ada anggota rumahtangga yang sakit?		
1	Tidak pernah	
2	Kadang-kadang dapat	
3	Ya, selalu dapat	
4	Tidak pernah ada yang sakit dalam 12 bulan terakhir	
Pengetahuan		
Apa tingkat pendidikan tertinggi dari anggota rumahtangga dewasa		

(termasuk kepala rumahtangga)?		
1	Sekolah Rakyat (SR) atau SD atau Kejar Paket A atau kurang	
2	SMP atau lulus kejar paket B	
3	SLTA atau yang lebih tinggi atau kejar Paket C	
Apakah ada anak-anak usia 7 s/d 16 tahun di rumahtangga anda yang bersekolah (anak-anak yang dibiayai oleh rumahtangga anda)?		
1	Semua tidak bersekolah	
2	Ada yang bersekolah, tapi tidak semua	
3	Semua anak-anak sekolah	
4	Tidak ada anak-anak yang berusia 7 s/d 17 tahun	
Ekonomi		
Status kepemilikan Bagunan rumah ?		
1	Milik Sendiri	
2	Menyewa	
Dalam 12 bulan terakhir, apa sumber-sumber pendapatan uang paling diandalkan bagi rumahtangga anda?		
1	Dagang	4 Buruh
2	Sopir	5 Pelayabab (Tukang Bengkel,dll)
3	Pembantu Rumah Tangga	6 Isi sndiri
Ada berapa jenis pendapatan responden?		
1	Satu	
2	Lebih dari satu	
Apakah pendapatan tersebut merupakan pendapatan tetap?		
1	Tidak Ada yang tetap	
2	Ya, ada yang tetap	
Poltik		
Apakah anda mendapat bantuan dari pemerintah		
1	Ya, mendapat	
2	Pernah (Kadang-kadang)	

3	Tidak pernah	
Apakah selama 12 bulan terakhir ini, pernah diadakan pelatihan, penyuluhan, kursus atau pendampingan usaha di kelurahan Anda?		
1	Tidak pernah	
2	Ya,Pernah	
Bagaimana program dukungan PEMERINTAH di Kelurahan anda dalam 12 bulan terakhir (secara mutu dan jumlah)?		
1	Rendah	
2	Sedag-sedang saja	
3	baik	

TERIMA KASIH ATAS KESEDIAAN ANDA MENGISI ANGKET INI

BOSOWA

